

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEPEMIMPINAN
DAERAH YANG IDEAL PADA TINGKAT PROVINSI
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA
LANGSUNG DI PROVINSI LAMPUNG)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

AKHMAD JAJULI
NIM. 014827694

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

ABSTRACT**PUBLIC PERCEPTION OF REGIONAL LEADERSHIP IN THE IDEAL OF PROVINCES
(CASE STUDY ON DIRECT ELECTION OF REGIONAL HEAD PROVINCE OF LAMPUNG)****Akhmad Jajuli****Universitas Terbuka****ahmadjajulidpd@yahoo.com****Keywords:** Public Perceptions, Political Behavior, Leadership Region, Regional Head Election

This research aims to see a public perception of the ideal local leadership at the provincial level with a study on the elections of candidates for governor and vice governor in direct elections in the province of Lampung in 2008. This research was designed using a survey approach with a quantitative descriptive method. While the total sample of 400 respondents were taken using multistage random sampling. The results suggest three things : first, public involvement in the electoral process with a very high participation rate of 93.2%. Second, governor candidate with a good program, democratic, and populist integrity will be given priority to be selected by the people. Third, ethnicity, integrity and program of the candidate, pragmatism, and political party affiliation on enough to affect the political choices the people of Lampung. Related with these findings, this research suggests three things. First, voters should continue to improve quality and quantity of their political participation. Second, the voter should be able to choose in elections with intelligently and rationally. Third, aspects of personal integrity and work programs need to be considered by the candidate in constructing an impression and design strategies to win the competition the election.

ABSTRAK**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEPEMIMPINAN DAERAH
YANG IDEAL PADA TINGKAT PROVINSI
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA
LANGSUNG DI PROVINSI LAMPUNG)****Akhmad Jajuli****Universitas Terbuka****ahmadjajulidpd@yahoo.com**

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Perilaku Politik, Kepemimpinan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran persepsi masyarakat tentang kepemimpinan daerah yang ideal pada tingkat provinsi dengan studi pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada secara langsung di Provinsi Lampung pada tahun 2008. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei dengan metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan jumlah sampel sebesar 400 responden yang diambil dengan menggunakan teknik penyampelan acak sederhana secara bertahap (*multistage random sampling*). Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, yaitu: pertama, keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada sangat tinggi dengan angka partisipasi sebesar 93,2%. Kedua, calon kepala daerah dengan program yang baik, demokratis, berintegritas dan merakyat akan diprioritaskan untuk dipilih oleh masyarakat. Ketiga, etnisitas, integritas dan program kandidat, pragmatisme, dan afiliasi pada partai politik cukup berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat Lampung. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian ini menyarankan tiga hal. Pertama, para pemilih hendaknya terus meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politiknya. Kedua, masyarakat pemilih hendaknya dapat menentukan pilihannya dalam pilkada secara cerdas dan rasional. Ketiga, aspek integritas pribadi dan program kerja perlu diperhatikan oleh kandidat dalam membangun kesan dan merancang strategi kampanye untuk memenangkan kompetisi pilkada.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
KEPEMIMPINAN DAERAH YANG IDEAL PADA TINGKAT PROVINSI
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA
LANGSUNG DI PROVINSI LAMPUNG) adalah hasil karya Saya sendiri dan
seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah Saya nyatakan
benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka
Saya bersedia menerima sanksi akademik.

Bandar Lampung, 14 Januari 2013
Yang Menyatakan



Akhnad Jajuli
NIM. 014827694

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

**JUDUL TAPM : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEPEMIMPINAN
DAERAH YANG IDEAL PADA TINGKAT PROVINSI
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG DI PROVINSI LAMPUNG)**

Penyusun TAPM : Akhmad Jajuli
NIM : 014827694
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

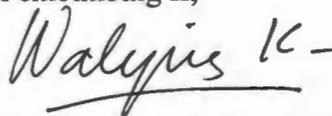
Menyetujui :

Pembimbing I,



(Dr. Hl. Suwondo, MA.)
NIP. 195909031985031002

Pembimbing II,



(Dr. Wahyuni Kadarko, M.Ed.)
NIP. 194705191986032001

Mengetahui,

**Keua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik**



(Dra. Susanti, M.Si.)
NIP. 196712141993032001



Direktur Program Pascasarjana



(Dr. Suciati, M.Sc.)
NIP. 195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

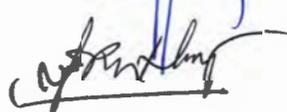
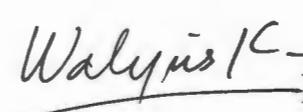
Penyusun TAPM : Akhmad Jajuli
 NIM : 014827694
 Program Studi : Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
 KEPEMIMPINAN DAERAH YANG IDEAL PADA
 TINGKAT PROVINSI (STUDI KASUS PADA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA
 LANGSUNG DI PROVINSI LAMPUNG)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
 Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Juli 2011
 Waktu : Pkl. 13.00-15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji :	Dr. Sofjan Aripin NIP. 196606191992031002	()
Penguji Ahli	: Dr. Wilfridus B. Elu NIDN. 0317076202	()
Pembimbing I	: Dr. Hi. Suwondo, MA. NIP. 195909031985031002	()
Pembimbing II	: Dr. Wahyuni Kadarko, M.Ed. NIP. 194705191986032001	()

KATA PENGANTAR

Segala puja dan syukur, segala terima kasih dan kekaguman kepada keharibaan Tuhan yang maha kuasa, Allah SWT atas segala nikmat dan kasih sayangNYA kepada Saya sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Daerah Yang Ideal Pada Tingkat Provinsi (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Provinsi Lampung).**

Dalam perjalanannya, menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dorongan, masukan, saran dan nasihat dari berbagai pihak kepada Saya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati. M.Ed., Ph.D. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Universitas.
2. Ibu Dr. Suciati, M.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Ibu Dra. Susanti, M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Hi. Suwondo, MA selaku Pembimbing I yang dengan tulus ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian yang tinggi dalam penyusunan tesis ini mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Wahyuni Kadarko, M.Ed selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan guna melancarkan proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Sofjan Aripin selaku Ketua Komisi Penguji, yang turut memberikan masukan dan saran demi penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Wilfridus B. Elu selaku Penguji Ahli yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyelesaian tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan bekal ilmu dan masukan demi penyempurnaan tesis ini

9. Bapak dan Ibu Pengelola UT UPBJJ Bandar Lampung, khususnya pengelola Program Magister Administrasi Publik yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.
10. Rekan-rekan satu almamater yang berjuang dan belajar bersama menimba ilmu dalam menyelesaikan studi ini.
11. Mas Suprihatin Ali dan Dedi Hermawan yang menjadi teman diskusi tanpa kenal lelah dengan segala kesibukannya masih menyempatkan diri untuk sumbang saran dan masukan demi penyelesaian tesis ini.
12. Mas Vittorio dan tim yang membantu untuk melakukan sensus dan jajak pendapat, turun lapang melakukan wawancara ke masyarakat. Atas ide, saran dan pengorbanannya demi membantu penyelesaian tesis ini.
13. Aep Susanto, Adi Rahmad, Anggi Aribowo, Sunaryo, dan juga kepada Akhmad Saprudin, disela-sela pekerjaannya menyempatkan diri membantu mengolah data untuk penyelesaian tesis.
14. Seluruh anggota dan rekan-rekan kerja di DPD RI yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Khusus, Penulis sampaikan kepada istriku dr. Endang Legarti dan buah hatiku Iman Ibrahim yang telah sabar mendampingi dan selalu memberikan motivasi agar studi ini segera selesai. Kalianlah salah satu sumber spirit dan inspirasiku dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, Penulis memohon maaf sekiranya tesis ini belum pada tingkat kesempurnaannya, masih banyak kekurangan dan hal-hal yang belum memadai dalam penulisan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai penyempurna tulisan dan karya ilmiah lainnya yang telah ada. Penulis juga berharap, di tengah keterbatasannya, tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu administrasi publik maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Administrasi Publik dan Desentralisasi Politik	11
2. Persepsi	32
3. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	39
4. Keterlibatan Rakyat dalam Memilih	46
5. Perilaku Pemilih	49

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih.....	57
B. Kerangka Teori	61
C. Definisi Operasional	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain dan Alur Penelitian	66
B. Ruang Lingkup Penelitian	68
C. Populasi dan Sampel	68
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Metode Analisis Data	73
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Responden	75
B. Peran Serta Masyarakat dalam Menentukan Calon Pemimpin Pemerintahan di Daerah	82
C. Faktor-Faktor yang Akan Menjadi Pertimbangan Bagi Masyarakat dalam Menentukan Kepala Daerah yang Akan Dipilih	99
D. Persepsi Masyarakat tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Akan Dipilih	105
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
Lampiran	123

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Variabel kunci yang mempengaruhi perilaku individu	37
Gambar 3.1 Alur penelitian	67
Gambar 3.2 Tahapan penarikan sampel	70
Gambar 4.1 Pengenalan terhadap calon kepala daerah	111
Gambar 4.2 Pilihan jika pilkada hari ini	112

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dari waktu ke waktu	17
Tabel 3.1 Proporsi jumlah sampel per kabupaten/kota	68
Tabel 3.2 Proporsi penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Lampung	70
Tabel 4.1 Identitas responden menurut jenis kelamin	76
Tabel 4.2 Karakteristik responden menurut kelompok usia	77
Tabel 4.3 Karakteristik responden menurut suku	77
Tabel 4.4 Karakteristik responden menurut agama.....	78
Tabel 4.5 Karakteristik responden menurut pekerjaan	79
Tabel 4.6 Karakteristik responden menurut penghasilan	80
Tabel 4.7 Karakteristik responden menurut pendidikan.....	80
Tabel 4.8 Karakteristik responden menurut organisasi	82
Tabel 4.9 Interaksi masyarakat dengan media massa (cetak)	82
Tabel 4.10 Ketertarikan dengan berita Pilgub.....	83
Tabel 4.11 Berita dijadikan bahan referensi dalam memilih kepala daerah	83
Tabel 4.12 Frekuensi dengar radio 3 bulan terakhir	84
Tabel 4.13 Acara radio yang sering di dengar	85
Tabel 4.14 Berita radio menjadi referensi Pilgub	85
Tabel 4.15 Mengetahui Pilgub langsung.....	86

Tabel 4.16 Asal informasi mengenai Pilgub	87
Tabel 4.17 Tanggal pelaksanaan Pilgub	87
Tabel 4.18 Akan memilih dalam Pilgub	89
Tabel 4.19 Alasan mengikuti Pilgub.....	89
Tabel 4.20 Pilgub menghasilkan Gubernur yang mampu memimpin	90
Tabel 4.21 Pilgub menghasilkan Gubernur yang berpihak pada rakyat .	91
Tabel 4.22 Pilgub akan terlaksana dengan jujur dan adil	93
Tabel 4.23 Masyarakat akan memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun	93
Tabel 4.24 Pilgub akan menyebabkan konflik di masyarakat	94
Tabel 4.25 Reaksi masyarakat jika ada yang memberikan uang/barang .	94
Tabel 4.26 Pendapat masyarakat tentang pernyataan: Jika ada yang memberi uang/barang, uang/barangnya diterima, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani	95
Tabel 4.27 Penilaian pemilih tentang sosok ideal Cagub dan Cawagub .	99
Tabel 4.28 Penilaian pemilih tentang penting integritas/akhlak Cagub dan Cawagub.....	99
Tabel 4.29 Penilaian pemilih tentang faktor yang jadi pertimbangan masyarakat dalam memilih Cakada	100
Tabel 4.30 Penilaian pemilih tentang calon yang sudah berpengalaman sebagai Kepala Daerah (<i>incumbent</i>)	101
Tabel 4.31 Penilaian pemilih tentang Cakada yang diusung oleh partai yang dipilih pada Pemilu 2004	101
Tabel 4.32 Penilaian pemilih tentang Cakada yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama	102
Tabel 4.33 Penilaian pemilih tentang faktor paling mempengaruhi dalam menentukan pilihan Cakada	104

Tabel 4.34	Persepsi pemilih tentang Lampung harus dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur dari suku Lampung	105
Tabel 4.35	Persepsi pemilih tentang Lampung harus dipimpin pasangan Cakada dari Lampung dan luar Lampung	106
Tabel 4.36	Persepsi pemilih tentang pasangan Cakada harus dari suku terbesar pertama dan kedua di Lampung	107
Tabel 4.37	Persepsi pemilih tentang pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu pertimbangan suku	107
Tabel 4.38	Persepsi pemilih tentang Cakada dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah	109
Tabel 4.39	Pilihan masyarakat jika Pilgub dilakukan hari ini (saat penelitian dilakukan)	112
Tabel 4.40	Alasan masyarakat dalam memilih Cakada	113
Tabel 4.41	Alasan masyarakat dalam memilih masing-masing kandidat	114

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lembar Kuesioner Sensus	138

Universitas Terbuka

Tesis ini didedikasikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI, para sahabat ikhwati pengusung bersih, peduli dan profesional, dan kedua orangtuaku; apa dan mamah; Hi. Muhammad Nur D dan Hj. E. Salbiah.

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan Daerah menjadi bagian penting dalam kajian Administrasi Publik yang didalamnya memuat organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Kepala Daerah merupakan sosok menejer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Kemudian Kepala Daerah juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis di tentukan oleh sejauh mana efektivitas peran yang dimainkan oleh Kepala Daerah dalam konteks institusi pemerintah daerah dan kemasyarakatan. Dengan kata lain arah dan tujuan organisasi pemerintahan di daerah serta dukungan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, kepemimpinan, dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah.

Melalui otonomi daerah, kepemimpinan daerah menjadi determinan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berbasiskan kepentingan masyarakat. Demokrasi lokal, otonomi daerah, dan penentuan kepala daerah merupakan rangkaian substansi yang saat ini tengah ditumbuhkembangkan di bumi Indonesia. Otonomi daerah membawa dampak luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia, serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah yaitu melalui pemilihan kepala

daerah secara langsung. Masyarakat dapat menentukan pilihannya, hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang terpilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik.

Adanya otonomi daerah dan kepemimpinan daerah membuat masyarakat memiliki keleluasaan untuk menentukan arah masa depannya, termasuk dalam penentuan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Menentukan siapa kepala daerah yang akan dipilih masyarakat sangat tergantung dengan apa yang ada dalam persepsi masyarakat itu sendiri mengenai para kandidat kepala daerah. Kajian persepsi masyarakat tentang kandidat ideal kepala daerah menarik untuk dilakukan dalam setting masyarakat Indonesia yang saat ini tengah terkukung oleh berbagai dimensi krisis, seperti krisis ekonomi, krisis moral, krisis kepercayaan. Apalagi sepanjang perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi, perilaku partisipasi politik masyarakat lebih menampakkan wajah politik pragmatis dibandingkan politik ideologis.

Studi mengenai proses politik pemilihan di Indonesia telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar menyoroti aspek institusi atau proses pemilu seperti kajian mengenai partai politik, dinamika pemilu, konflik di dalam partai politik, konflik pemilu dan sebagainya. Jarang penelitian yang memusatkan perhatian pada pemilih, seperti apa alasan seseorang memilih partai politik, faktor

apa yang menjelaskan ia memilih partai tertentu dibanding partai lain, dan sebagainya. Padahal, penelitian dari sisi pemilih ini justru sangat penting (Eriyanto, 2007).

Penelitian yang dapat dikategorikan sebagai studi perilaku pemilih adalah studi Gaffar (1992). Ada dua hal yang penting kaitannya dengan pemilihan kepala daerah langsung. Pertama adalah terbukanya partisipasi masyarakat untuk memberi dukungan bagi calon kepala daerah secara langsung tanpa melalui perwakilan elit anggota DPRD, dan kedua adalah bahwa dukungan akan diberikan dengan penuh ketika calon yang ada sudah sesuai dengan harapan dan persepsi masyarakat yang berdaulat yang akan memberikan hak pilihnya. Di sinilah pentingnya studi ini dilakukan dalam rangka dapat mengungkap persepsi masyarakat tentang calon kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakilnya.

Mulai bulan Juni 2005 Indonesia untuk pertama kali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Pelaksanaan pilkada yang sudah masuk pada tahun kedua sejak awal berlangsungnya pada tahun 2005 lalu, telah menampilkan wajah yang dinamis sebagai bentuk dari praktek demokrasi langsung dalam ruang otonomi daerah yang dibingkai oleh negara kesatuan. Satu kemajuan yang berarti bagi sejarah bangsa Indonesia karena telah ada perubahan paradigma dari pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan melalui DPRD menjadi pemilihan dengan sistem pilih langsung. Hal ini akan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Karena pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan melalui DPRD sarat dengan rekayasa, begitu mudah

diintervensi, adanya politik uang, politik dagang sapi, tawar-menawar, dan berbagai penyimpangan lainnya (Sudaryanti, 2008).

Model pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan reformasi politik bangsa Indonesia. Melalui model ini, rakyat mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam menentukan pemimpin pemerintahan mereka di tingkat lokal. Perubahan sistem demokrasi perwakilan menjadi sistem demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah juga merupakan paket reformasi politik yang mendapat dukungan masyarakat. Survei nasional yang diselenggarakan tahun 2002 oleh Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Jakarta, di 10 daerah otonom di Indonesia, yaitu Pematang Siantar, Palembang, Buton, Kutai Timur, Manggarai, Yogyakarta, Makasar, Pontianak, dan Cianjur mengungkap bahwa sudah saatnya hak pemilihan langsung kepala daerah bagi masyarakat diberikan kepada masyarakat. Survei tersebut mengungkap bahwa 73% masyarakat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, dengan 53,31% mengusulkan agar calon diajukan langsung oleh rakyat, dan 18,84% mengusulkan agar calon diajukan oleh lembaga DPRD baik Provinsi/Kabupaten/Kota.

Model pemilihan kepala daerah secara langsung menjadikan suara rakyat sebagai faktor penentu. Untuk memperoleh dukungan, para calon kepala daerah harus menyiapkan diri memenuhi harapan rakyat dan dapat menawarkan program-program yang kemungkinan besar mendapat sambutan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang akan membuat mereka terpilih menjadi kepala daerah. Keterlibatan masyarakat dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh ketika

kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Proses demokratisasi yang sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu. Format demokrasi pada aras lokal (pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat kualitas partisipasi masyarakat yang baik.

Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa persepsi dan pertimbangan politik masyarakat cenderung kuat kepada tarikan politik irrasional dibandingkan rasional. Para politisi dan calon kandidat yang akan berkontestasi meyakini bahwa masyarakat pemilih di kota dan desa di Indonesia masih bersifat pemilih tradisional, sosiologis, atau memilih berdasarkan kesamaan suku. Dalam pandangan ini kemudian hanya berlaku dua rumus, yakni bila kandidat kepala daerah bersuku minoritas, maka wakilnya harus berasal dari suku mayoritas atau sebaliknya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persepsi politik masyarakat belum terbangun secara rasional dimana pilihan politik semestinya dominan didasarkan atas pertimbangan kapabilitas, visi dan misi, program kerja, dan integritas kandidat kepala daerah.

Para pemilih kota dan desa dari suku mayoritas dan minoritas diyakini akan memilih kandidat dengan pertimbangan (hanya) kedekatan suku dan kebudayaan itu. Padahal, secara menyeluruh atau lebih kompleks, perilaku pemilih masyarakat desa dan kota tidak saja dipengaruhi oleh faktor sosiologis (etnis, budaya, aliran) semata, namun juga faktor-faktor lain seperti struktural, psikologi, ekologi, dan rasional-pragmatis. Bahkan, setelah melewati berbagai pemilihan langsung di era reformasi ini, telah terjadi pergeseran perilaku pemilih masyarakat desa dan kota yang menyebabkan sentimen etnis, aliran dan kelas sosial sudah tidak memadai lagi menjelaskan perubahan perilaku pemilih. Faktor

etnis hanyalah salah satu faktor dari sekian faktor yang menentukan kemenangan kandidat seperti program, kompetensi kandidat, kepribadian, yang dapat memberikan dampak jauh lebih besar dibandingkan sekedar persamaan etnis mayoritas pemilih. Walaupun demikian, fenomena positif perilaku rasional pemilih ini masih sangat minim dibandingkan perilaku irrasional.

Kemampuan memahami perkembangan perilaku memilih masyarakat desa dan kota, secara praktis bermanfaat dalam mendesain *political marketing*. Dalam konteks pilkada, ini berarti bermanfaat dalam membentuk pasangan calon kandidat, penyiapan visi/misi/program kandidat, dan penyiapan materi kampanye. Sebaliknya, ketidakmampuan memahami perkembangan perilaku memilih masyarakat desa dan kota, menyebabkan strategi *political marketing* lemah dan berdampak pada kekalahan kandidat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 mengakibatkan perubahan pelaksanaan pemerintahan di daerah, khususnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Aturan tersebut menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dipilih langsung oleh rakyat di daerah, sehingga konsep demokrasi dalam pemilihan kepala daerah berubah dari sistem demokrasi perwakilan menjadi sistem demokrasi langsung.

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 59 ayat (1), menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik. Sedangkan partai politik atau gabungan partai-partai politik yang dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai-partai politik yang telah memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya

15% dari jumlah kursi DPRD, atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan (Pasal 59 ayat (2) dalam UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Adanya perubahan tentang tata cara pemilihan kepala daerah diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang andal, yang tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin, tetapi juga komitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan demokratis. Pilkada langsung diharapkan akan membawa perubahan pada sistem pemerintahan di daerah yang lebih demokratis dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan asas demokrasi itu sendiri.

Salah satu bagian penting untuk diketahui oleh masyarakat mengenai tahapan pilkada secara langsung tersebut yaitu pada tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pasal 56 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 36 ayat 1 dikatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik, masalah politik yang kemungkinan masih dapat terjadi. Berdasarkan pendapat Wasistiono (2005: 1), selama partai politik belum terbebas dari praktek *money politics*, pilkada secara langsung tetap belum dapat melepaskan diri dari lingkaran setan pemerasan (*vicious circle of bribing*). Lingkaran ini akan terus berlangsung jika sejak awal masa pencalonan, partai politik menentukan kemampuan finansial bakal calon kepala daerah (balon kada) sebagai syarat utama.

Apabila suasana demokrasi terus berkembang menjadi kongkrit dan nyata, atau semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakatnya, maka

kelangsungan demokrasi akan semakin baik pula. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi tersebut.

Melalui mekanisme demokrasi seperti ini pulalah, maka tak terkecuali kepemimpinan daerah Provinsi Lampung, juga seharusnya mendapat tempat yang baik di masyarakat. Menurut Syafarudin (2008), masyarakat kota dan desa memiliki perilaku memilih (*voting behaviour*) yang berbeda bukan hanya berbeda di tingkat geografis tempat tinggal, namun berbeda dalam akses informasi, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan pilihan orientasi. Seiring dengan kemajuan zaman, era globalisasi, meratanya pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan arus informasi, mungkin saja perilaku memilih dalam pemilu pada masyarakat desa mendekati sama dengan perilaku memilih masyarakat kota.

Melalui mekanisme demokrasi seperti ini pulalah, maka tak terkecuali kepemimpinan daerah Provinsi Lampung, juga seharusnya mendapat tempat yang baik di masyarakat. Menurut Syafarudin (2008), masyarakat kota dan desa memiliki perilaku memilih (*voting behaviour*) yang berbeda bukan hanya berbeda di tingkat geografis tempat tinggal, namun berbeda dalam akses informasi, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan pilihan orientasi. Seiring dengan kemajuan zaman, era globalisasi, meratanya pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan arus informasi, mungkin saja perilaku memilih dalam pemilu pada masyarakat desa mendekati sama dengan perilaku memilih masyarakat kota.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat topik penelitian mengenai Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Kepala Daerah yang Ideal Pada Tingkat Provinsi. Penelitian ini sendiri mengambil studi kasus

pada persepsi masyarakat Lampung tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur Langsung.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan model pemilihan kepala daerah yaitu dari sistem pemilihan demokrasi perwakilan menjadi sistem pemilihan demokrasi langsung yang mengakibatkan adanya perubahan peran serta masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur).
2. Terbuka peluang bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya sesuai dengan persepsi masyarakat sendiri yang dilakukan secara bebas, berdaulat, dan demokratis.
3. Suara masyarakat menjadi penentu sosok kepala daerah dalam pilkada langsung. Dengan begitu, para calon kepala daerah harus mengetahui persepsi masyarakat dan berusaha mendekati diri dengan kriteria sosok kepala daerah yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam menentukan calon pemimpin pemerintahan di daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana yang diatur oleh UU Nomor 32 tahun 2004?.
2. Faktor-faktor apa saja yang akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan kepala daerah yang akan dipilih ?

3. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang seorang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih mereka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi peran dan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih kepala daerah.
3. Mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara praktis dan teoritis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang akan menentukan pilihan politiknya dalam setiap agenda pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, dapat pula dimanfaatkan oleh individu yang akan mencalonkan diri dalam pemilu gubernur di Provinsi Lampung. Kemudian hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung, khususnya bagi partai politik yang akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kepemimpinan daerah di era otonomi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi Publik dan Desentralisasi Politik

Pemahaman terhadap Ilmu Administrasi Publik dapat ditelusuri melalui perkembangan paradigma administrasi publik yang mengalami pergeseran paradigma dari waktu ke waktu. Untuk itu dalam menggambarkan sejarah perkembangan paradigma administrasi publik oleh Golembewski (1977) memakai pendekatan matriks locus dan focus, yang disimbolkan dalam 2X2 matriks sehingga menghasilkan jumlah 4 perkembangan administrasi publik, yaitu:

- a. Fase perbedaan analitik politik-administrasi
- b. Fase perbedaan konkrit politik-administrasi
- c. Fase ilmu manajemen; dan
- d. Fase orientasi kepada kebijakan publik (lihat Zauhar, 2001)

Sedangkan perkembangan paradigma administrasi public menurut Henry (2004) dalam karya klasiknya yang berjudul *public administration and Public Affairs*, dinyatakan bahwa telah terjadi adanya timbul-tenggelamnya paradigma ilmu administrasi publik dari kurun waktu 1900-an-1970-an. Henry menengahkan lima paradigma yang dalam administrasi negara, yaitu (1) dikotomi politik/administrasi, (2) prinsip-prinsip administrasi serta tantangan yang timbul dan jawaban terhadap tantangan tersebut, (3) administrasi negara sebagai ilmu politik, (4) administrasi negara sebagai manajemen, (5) administrasi negara sebagai administrasi negara. Berbagai cara pendekatan tersebut perlu dipahami oleh pelajar ilmu administrasi negara.

Sejak kelahirannya, pendekatan ilmu administrasi negara selalu berhubungan dengan ilmu politik. Bahkan esai Woodrow Wilson (1887) dalam *The Study of Public Administration* yang menjadi cikal bakal ilmu administrasi merupakan upaya untuk menajamkan fokus bidang studi politik, yaitu membuat pemisahan antara politik dengan administrasi. Di tahun-tahun berikutnya ilmu administrasi diperkuat dengan berkembangnya konsep-konsep *manajemen*, seperti manajemen ilmiah dari Taylor (1912), dan *organisasi*, seperti model organisasi yang disebut *birokrasi* dari Weber (1922). Namun, dalam konteks pembahasan ini, perhatian utama diberikan pada perkembangan pemikiran administrasi publik yang lekat dengan ilmu politik.

Setelah mengenal fase paradigma dalam administrasi publik menurut Nicolas Hendry (2004) dan beberapa pandangan tentang administrasi publik dan politik maka dapat dijelaskan bahwa administrasi publik merupakan sebagai proses politik. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu penekanan bahwa dewasa ini dikotomi politik dengan administrasi sudah tidak dapat dibenarkan lagi. Politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi, dan kegiatan pemerintahan merupakan produk dari berbagai bargaining dan kompromi antar keduanya.

John Rehfuus (1973) mengatakan bahwa politik merupakan perjuangan untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber-sumber sosial secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi (*Politics the Struggle over the allocation of social values and resources-is intimately intertwined with administrative action*). Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa peranan lembaga-lembaga pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijaksanaan

publik tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijaksanaan tersebut. Peranan kembar yang dimainkan oleh lembaga-lembaga publik tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya peranan administrasi publik dalam proses politik.

Desentralisasi secara umum dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu administratif dan politik. Berdasarkan perspektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local government* (Romli, 2005). Artinya dalam perspektif otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, desentralisasi administratif ini diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sedangkan dilihat dari perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi sebagai *the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of governments within a state, or office within a large organization*.

Mawhood mengatakan bahwa desentralisasi politik adalah *devolution of power from central government to local government*. Mawhood juga meletakkan konteks desentralisasi politik sebagai esensi dasar otonomi bagi daerah yaitu *a freedom which is assumed by local government in both making and implementing its own decision* (Prasojo et al, 2006). Menurut Rondinelli (1983) pilihan terhadap orientasi pemerintahan yang didasarkan pada beberapa alasan yang ditinjau dari berbagai dimensi, seperti :

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak, yang pada akhirnya menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam

pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

- c. Dari sudut teknik organisasi pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap diurus pemerintah pusat.
- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Dalam konteks negara kesatuan, otonomi yang diberikan oleh daerah bukanlah suatu bentuk kebebasan yang bersifat asli, melainkan merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Konteks pemberian otonomi oleh pemerintah pusat ini sangat terkait dengan kontruksi bentuk negara dan pembagian kekuasaan yang ada di dalamnya. Secara teoretis dalam perspektif praktek ketatanegaraan yang ada, terdapat dua macam bentuk negara dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu negara kesatuan dan negara federal.

Kedua bentuk negara ini dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan kepada dimensi: (1) Karakter dasar yang dimiliki oleh struktur pemerintahan regional/lokalnya, (2) Proses pembentukan struktur pemerintahan regionalnya, (3) Sifat hubungan antara struktur pusat dan struktur regional, (4) Keberadaan

konstitusi, dan (4) Derajat kemandirian yang dimiliki oleh struktur regional (Prasojo et. al, 2006). Dalam pembahasan ini, hanya akan dijabarkan tiga dimensi pembeda saja melihat konteksnya yang berhubungan erat dengan desentralisasi politik.

Karakter dasar pemerintah daerah dalam negara kesatuan tidak memiliki karakter soberenitas (kedaulatan), sedangkan negara bagian dalam negara federal merupakan struktur asli yang memiliki karakter kedaulatan. Kusnardi dan Ibrahim (1988) menyebutkan bahwa dalam negara federal, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasarnya sendiri dan dapat menentukan organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara federal seluruhnya, sedangkan negara kesatuan, memiliki organisasi dan kewenangan untuk membuat undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah merupakan pelaksana kebijakan pemerintah pusat dalam sistem desentralisasi.

Pelaksanaan pilkada langsung yang saat ini ada merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk memilih secara langsung kepala daerahnya, sehingga konteks aturan yang berlaku dalam pilkada merupakan jabaran atau turunan dari aturan yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Perspektif desentralisasi politik menjelaskan bahwa dengan adanya pilkada maka kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada pemerintah pusat, tetapi dapat didistribusikan kepada daerah-daerah.

Daerah memiliki posisi yang jauh lebih kuat untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya

tersebut, sehingga wajar apabila pemberian desentralisasi politik dan pelaksanaan pilkada ini berada dalam ranah pemerintahan daerah, karena konteks sistemik dari pemberian kekuasaan kepada daerah untuk memiliki pemimpin daerah sendiri secara langsung merupakan pemberian dari pemerintah pusat.

Selain itu pula dalam konteks bingkai negara kesatuan yang dipilih menjadi bentuk negara berdasarkan konstitusi ini harus tetap menjaga keterpautan yang kuat antara hubungan pusat dan daerah. Mengingat pergolakan arus gerakan antara putaran sentrifugal dan sentripetal yang menarik hubungan daerah ke dalam lingkaran pusat dan sebaliknya, harus dijaga dinamisasinya agar tidak saling tertarik terlalu dalam antara salah satu arus tersebut.

Universitas Terbuka

Tabel 2.1 Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dari Waktu Ke Waktu

No	Undang-Undang	Prinsip Dasar	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
1	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945	<p>A. Membentuk Komite Nasional Daerah diseluruh karesidenan, Kota berotonomi dan Kabupaten serta daerah-daerah kepala lain yang diperlukan kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p>B. Komite Nasional Daerah selanjutnya dijadikan badan perwakilan rakyat daerah (BPRD).</p> <p>C. Tugas utamanya BPRD menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi daripadanya (pasal 2). Dalam hal ini termasuk membuat peraturan daerah dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat atasnya.</p> <p>D. KND memilih beberapa orang, sebanyak banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah melaksanakan Pemerintahan Daerah.</p> <p>E. Ketua BPRD dijabat rangkap oleh Kepala Daerah sebagai kepala badan eksekutif.</p>	Dipilih oleh Dewan
2	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948	<p>A. Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.</p> <p>B. Ketua dan wakil Ketua dewan perwakilan rakyat daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>C. Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah.</p>	Kepala Daerah dipilih oleh Pemerintah Pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.
3	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957	<p>A. Perubahan daerah otonom swapraja menjadi daerah swatantra dan daerah istimewa, dimana pembagian daerah tersebut dibagi menjadi 3 tingkat</p> <p>B. Hubungan pusat dan daerah</p>	<p>1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.</p> <p>2. Kepala Daerah</p>

No	Undang-Undang	Prinsip Dasar	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
		C. Sistem otonomi riil D. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD E. E. Kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRD semakin luas	tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.
4	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965	A. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; B. Kepala Daerah melaksanakan politik pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada. C. Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh wakil Kepala Daerah dan badan pemerintah harian (pasal 6) D. DPRD mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa wakil Ketua yang jumlahnya menjamin "poros nasakom".	1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. 2. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.
5	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974	A. Otonomi Nyata dan Bertanggungjawab B. Pembagian daerah dibagi menjadi dua daerah yaitu daerah tingkat I untuk wilayah propinsi dan daerah tingkat II untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya.	1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. 2. Kepala Daerah

No	Undang-Undang	Prinsip Dasar	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
		C. Bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD	tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.
6	Undang-undang Nomor 22 tahun 1999	<p>A. Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonomi.</p> <p>B. Daerah-daerah otonom provinsi, kabupaten/kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki sebagaimana ditentukan pada pasal 4.</p> <p>C. Daerah otonom provinsi berkedudukan juga sebagai daerah administratif.</p> <p>D. Kepala Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, Kepala Daerah kabupaten adalah bupati, Kepala Daerah kota adalah wali kota.</p> <p>E. Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislative daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah.</p> <p>F. Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya.</p> <p>G. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, bupati dan walikota bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten/kota.</p>	Kepala Daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Sumber: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (2007)

Proses pencalonan ini terdapat setidaknya dua sub isu yang penting yaitu *pertama* terkait dengan persyaratan parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon dan *kedua* persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. Berhubungan dengan persyaratan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) yaitu sekurang-kurangnya memiliki 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif, dalam prakteknya ketentuan ini telah membuka kesempatan pada banyak calon dan parpol untuk berlomba menjadi atau mengajukan calonnya. Namun, hal ini di sisi yang lain memiliki relasi politik dengan mekanisme *checks and balances* yang tidak stabil antara eksekutif dan legislatif.

Ketentuan tersebut sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pilkada yang berkenaan dengan *pertama* ketidakpuasan sejumlah pihak atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD, dan *kedua* tidak adanya upaya hukum yang dapat diambil untuk menggugat keputusan KPUD yang bersifat final dan mengikat ini.

Hal *pertama* berkenaan dengan ketidakpuasan para pihak, perlu ada kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntabilitas dan transparansi KPUD di dalam melakukan verifikasi ini. Kesan tertutup dan penggunaan indikator yang tidak konsisten dari KPUD dalam melakukan verifikasi persyaratan telah menciptakan keragu-raguan perihal integritas KPUD, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan tuduhan keberpihakan dari KPUD kepada salah satu atau sejumlah pasangan calon. Untuk itu dalam mengumumkan hasil verifikasi, KPUD perlu menjelaskan kepada publik

dan kepada para pasangan calon kriteria dan hasil verifikasi yang dilakukan sehingga proses transparansi tercipta dalam tahapan ini.

Hal *kedua* dari sistem pilkada langsung yang perlu dicermati ialah dari sisi proses. Hal ini terkait dengan mekanisme untuk memproses pasangan calon yang diajukan sehingga dapat mengikuti pilkada hingga dipilih oleh rakyat pada hari pemungutan dan memperoleh suara untuk ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Isu-isu yang strategis dari sisi proses ini antara lain terkait dengan tiga faktor yaitu penetapan calon, kampanye, dan proses pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan pemenang.

Selain dari penetapan calon, dari sisi proses hal lain yang perlu dicermati ialah masalah pelaksanaan kampanye. Dari pelaksanaan kampanye ini ada dua catatan yang dapat diberikan yaitu terkait dengan bentuk kampanye dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Catatan pertama mengenai bentuk kampanye, dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 82, diatur mengenai teknis kampanye, baik rentang waktu pelaksanaan, pelaksana kampanye, jadwal kampanye, bentuk, dan media kampanye, dan larangan-larangan yang berlaku selama pelaksanaan kampanye. Dari berbagai aturan ini nampak bahwa kampanye dilihat sebagai tahapan yang sangat esensial dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kampanye diharapkan dapat pula menjadi media pendidikan dan komunikasi politik bagi masyarakat.

Melihat kecenderungan pelaksanaan kampanye yang saat ini berjalan baik dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu, maka ada tiga bentuk pengelompokan kampanye, yaitu *white campaign*, *dark campaign*, dan *black campaign* (Sahdan, 2005). *White campaign* adalah jenis kampanye yang tidak bertentangan dengan

norma-norma demokrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. *Dark campaign* adalah jenis kampanye yang dilakukan, tanpa mengikuti norma-norma, petunjuk dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan *black campaign* adalah jenis kampanye yang secara khusus dilakukan untuk memunculkan citra negatif atau memojokkan pihak lawan.

Baik kampanye dalam kategori *dark* maupun *black*, sama sekali tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, terutama prosedur yang berkaitan dengan pilkada. Dalam penyelenggaraan pilkada yang perlu menjadi perhatian serius adalah jenis kampanye hitam (*black campaign*). Cukup sulit bagi panitia pengawas pemilu untuk mendapatkan bukti yang memadai dalam menangani kasus-kasus ini. Untuk itu perlu ada ketegasan dari undang-undang untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi yang melaporkan pelaksanaan kampanye ini agar dapat ditindak tegas.

Potensi dampak yang muncul dari adanya kampanye hitam ini bagi pilkada tidaklah ringan, antara lain (1) merusak kompetisi dan persaingan yang sehat; (2) dominasi dan hegemoni calon-calon tertentu dalam kampanye, terutama mereka yang didukung oleh berbagai sumber daya, termasuk sumber daya represif; (3) tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk menentukan kompetitor atau calon kepala daerah yang berkualitas; (4) pihak lawan yang mengalami ketakutan untuk menyampaikan visi, misi dan programnya dan bahkan takut untuk muncul di depan umum; (5) kampanye tidak akan bermakna sebagai bentuk komunikasi dan pendidikan politik.

Hal lain yang juga terkait erat dengan pelaksanaan kampanye yang sehat ini adalah penggunaan fasilitas negara dan tidak netralnya PNS, TNI dan Polri

terhadap pasangan calon. Sudah saatnya ditegaskan secara benar bahwa PNS, TNI atau Polri yang terbukti berpihak untuk diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Para *incumbent* yang dinilai punya potensi besar untuk menggunakan kekuasaannya ini harus diawasi secara ketat, Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa calon *incumbent* harus mundur wajib diimplementasikan dan diikuti oleh KPUD. Tidak diperkenankan lagi adanya calon *incumbent* yang dapat cuti ketika melakukan kampanye dan kembali bekerja di luar hari kampanye. Untuk menciptakan pilkada yang *fair*, harus ada ketegasan dari semua pihak untuk bertarung secara adil dan tidak menggunakan jabatan sebagai alat untuk meraih dukungan masyarakat.

Pelaksanaan kampanye juga memerlukan perhatian dalam menerapkan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Ancaman penggunaan dana besar untuk melakukan politik uang dalam pilkada telah menjadi hal yang dapat dirasakan namun sulit untuk dibuktikan. Terjadinya politik uang di dalam pilkada menurut Sahdan (2005) disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, calon kepala daerah yang berkompetisi tidak memiliki integritas dan kepribadian yang dapat diandalkan atau diakui, baik oleh parpol, KPUD maupun oleh massa. Penggunaan uang untuk memengaruhi parpol, KPUD dan massa merupakan salah satu cara cepat untuk meningkatkan popularitas dalam waktu singkat.

Kedua, pilkada sebagai ruang berkompetisi yang sangat ketat dan terbatas. Implikasinya, persaingan membutuhkan kompetitor yang tangguh, berkualitas dan mampu bersaing dengan baik. Namun dari berbagai pilkada yang telah dilaksanakan, bermunculan kandidat-kandidat yang minim kualitas, miskin visi dan *platform* serta tidak memiliki komitmen untuk membangun daerah. Uang

akhirnya dijadikan garansi untuk menjamin kemenangan. Siapa yang memiliki uang, dia yang akan menjadi pemenangnya.

Ketiga, masih lemahnya kesadaran politik masyarakat sipil, karena dengan mudahnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata dan tidak mampu melakukan kontrol yang kuat. *Keempat*, institusi pengawas masih bersifat organisasi kerumunan yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kurangnya kapasitas dan daya dukung membuat panwas tak bergigi.

Faktor *kelima* adalah media massa lokal belum mampu mengorganisir isu-isu politik uang menjadi isu yang berpengaruh terhadap kontestasi pilkada. Media massa justru umumnya ikut terseret arus politik uang dan menjadikan pilkada sebagai lumbung *cash flow* perusahaan media. Kandidat yang paling banyak mengucurkan uang, baik dalam bentuk iklan di media maupun pengeluaran tak resmi kepada wartawan atau pimpinan media, mampu mengamankan dari berita-berita negatif termasuk soal politik uang.

a. Peran Partai Politik dalam Pilkada

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warganegara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *Political parties created democracy*. Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh

Schattscheider dikatakan pula, *Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties.*

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *checks and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya memengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamisasi perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warganegara

(Asshiddiqie, tanpa tahun). Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *Political parties created democracy*. Partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, *Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo (2000) dalam Asshiddiqie, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interests* yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan respon dan tanggapan berupa dukungan dari masyarakat luas. Proses sosialisasi politik ini, menjadikan partai politik memiliki peran penting dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik menjadi struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warganegara. Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawaian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*apolitical appointment*), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political appointment*).

Perbedaan antara jabatan politik dengan jabatan teknis-administratif dan profesional membutuhkan pemahaman yang benar dan taat aturan, agar tidak terjadi pencampuran dalam pengisian jabatan. Di lingkungan kementerian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat politik, yaitu menteri. Sedangkan para pembantu menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beranekaragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beranekaragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Partai politik sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*) memiliki peran untuk melakukan agregasi kepentingan (*aggregation of interests*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-

beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

Nurjaman (1998) juga menegaskan partai politik sebagai pilar dari kehidupan politik yang demokratis. Menurut Nurjaman (1998), hal ini dikarenakan partai politik menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar kehidupan yang demokratis. Ada beberapa pengertian mengenai partai politik, antara lain seperti *A group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power*” (Joseph Schumpeter), *Any political group identified by a given label that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office*” (Giovanni Sartori), *“Permanent organizations which contest elections, usually because they seek to occupy the decisive decisions of authority within the state”* (Hague, Harrop, Breslin).

Sementara Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas (Neumann, 1981).

Neumann menunjukkan bahwa partai politik hanya terdapat dalam sebuah masyarakat atau negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini dapat ditunjukkan melalui persaingan yang dilakukan oleh partai politik, dimana persaingan itu dilakukan dalam pemilihan umum.

Aktivitas dan program yang dilakukan partai politik tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai kelompok kepentingan (*interest group*) karena partai politik tidak mudah untuk dapat dibedakan dengan kelompok kepentingan yang terorganisir. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama; dan mereka bekerjasama untuk memengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya kepentingan, tujuan dan keinginan mereka. Akan tetapi umumnya kelompok kepentingan ini berafiliasi dengan partai politik tertentu untuk dapat mengartikulasikan kepentingan mereka dan imbalannya kelompok kepentingan melakukan mobilisasi massa untuk mendukung partai politik tersebut.

Partai politik yang baik harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang melekat dalam dirinya. Sebagian ahli menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah *servicing as intermediaries, nominating candidates, contesting elections and channeling, organizing the government, providing public accountability, managing conflict* (John Bibby, 1992). Namun pada umumnya partai politik itu mempunyai fungsi melakukan sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik, pengatur konflik, dan mengkritik rezim yang berkuasa.

Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan perlu menjalani proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa. Proses inilah yang dinamakan artikulasi kepentingan (*interest articulation*). Berbagai pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada dalam masyarakat yang disalurkan oleh partai politik kepada pihak penguasa tersebut dapat berwujud tuntutan-tuntutan dan dapat pula berwujud dukungan-dukungan. Baik tuntutan dan dukungan ini lantas disalurkan kepada pemerintah. Apabila terdapat tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan dari masyarakat yang ada kesamaan-kesamaan atau pun menyangkut masalah-masalah yang sama maka tuntutan dan dukungan itu dijadikan satu. Proses penggabungan tuntutan dan dukungan ini dinamakan agregasi kepentingan (*interest agregation*).

Dalam sebuah sistem politik demokrasi, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan oleh partai politik pada hakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu sendiri. Masukan tersebut kemudian disalurkan atau disampaikan kepada badan-badan yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan-kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat seluruh warga negara. Badan-badan yang mempunyai wewenang itu pada umumnya diwakili oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. Badan-badan tersebut mengolah setiap *input* yang masuk untuk dijadikan *output*, yaitu kebijakan-kebijakan mempunyai kekuatan mengikat segenap warga negara. Bentuk kebijakannya dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan umum lainnya.

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi.

Kajian tentang persepsi menjadi penting dalam memahami proses pilihan masyarakat terhadap calon kepala daerah tertentu. Ada banyak pengertian tentang persepsi. Para ahli menjelaskannya sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Sebagai salah satu faktor psikologis, persepsi yang muncul pada masyarakat didasarkan pada kebutuhan dan keinginan, serta nilai dan harapannya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perilakunya.

Menurut Wells dan Prenska (1996: 257) persepsi adalah *the process by which an individual selects stimuli from his or her environment, organizes information about stimuli, and interprets the information to form a coherent meaning full view of the world*. Sedangkan Mowen dan Minor (2001:82) menyatakan bahwa persepsi adalah proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya.

Persepsi individu dalam masyarakat terhadap suatu objek tidak sama atau berbeda, termasuk karakter seseorang akan memengaruhi penafsiran dari perilaku persepsi individual, sebagaimana dikatakan Winardi (1992: 42) bahwa masing-masing orang memberi artinya sendiri terhadap yang distimuli, maka dapat dikatakan bahwa individu-individu yang berbeda, melihat hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda.

King dan Robinson (1994: 36) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana kita melihat, mendengarkan, merasakan, mengecap dan mencium dunia sekitar kita. Dengan kata lain persepsi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu hal yang dialami oleh manusia. Artinya persepsi memfokuskan pada sisi yang dialami oleh

individu manusia itu sendiri yaitu bagaimana individu-individu manusia dapat melihat, mengecap, mendengarkan, merasakan dan mencium fenomena yang terjadi dan lebih menitikberatkan pada apa yang dialami oleh individu manusia itu sendiri.

Menurut Rachmat (1994: 5) persepsi adalah pengalaman terhadap objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Di sini persepsi berarti pengalaman apa saja yang dialami setelah mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang individu alami.

Persepsi diasosiasikan dengan interpretasi dan pemberian makna terhadap orang atau objek tertentu. Dengan mengutip Cohen Fisher dalam buku teori komunikasi, Sendjaja (1994: 52) mengemukakan bahwa persepsi didefinisikan sebagai interpretasi terhadap berbagai sensasi representasi dari objek-objek eksternal. Artinya persepsi di sini lebih menitikberatkan pada pengaruh faktor eksternal dari seseorang untuk mempersepsikan suatu objek yang ditangkap dari lingkungan eksternal individu tersebut. Sementara itu, Mar'at (1981: 21) mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

"Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan penerimaan dan kemauan untuk berbuat."

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa persepsi adalah kesan sebagai akibat dari adanya suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, akan menentukan penerimaan dan kemauan untuk melakukan sesuatu.

Persepsi yang terbentuk terkadang adalah perasaan senang dan tidak senang yang menurut David O' Sears sebagaimana dikutip Sarlito Wirawan

Sarwono (2002: 7) disimpulkan sebagai persepsi positif adalah prasangka positif bahwa seseorang cenderung menyukai atau mendukung sesuatu, sedangkan persepsi negatif adalah prasangka negatif dimana seseorang cenderung tidak menyukai atau tidak mendukung sesuatu.

b. Pengertian Persepsi Politik

Supardan (2008: 512) mengatakan dalam bukunya Pengantar Ilmu Sosial bahwa persepsi politik maksudnya adalah pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi, bedanya jika politisi lebih bersifat "segera" (daripada hal teoretis) sedangkan pandangan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam suatu kepentingan atau tujuan.

Sedangkan menurut Said Gatara dan Said (2007: 155) persepsi politik berarti bahwa orang-orang yang berbeda dapat menanggapi pesan politik yang sama secara berbeda-beda. Artinya di sini persepsi politik adalah pandangan mengenai objek yaitu politik yang dialami oleh individu dan memasukkan masalah politik di dalam pandangan individu tersebut.

c. Sifat Persepsi

Menurut Mar'at (1981: 32) persepsi memiliki sifat-sifat yaitu:

1). Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan makna dari objek atau peristiwa, seseorang harus memiliki dasar untuk melakukan interpretasi. Dasar ini biasanya ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan objek atau peristiwa tersebut atau hal yang menyerupai.

2). Persepsi merupakan proses yang selektif

Ketika memersepsikan sesuatu, seseorang cenderung melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu dari objek dan menyebabkan yang lain. Dalam hal ini biasanya seseorang memersepsikan apa yang seseorang inginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri kita dan menyebabkan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai-nilai atau keyakinan seseorang tersebut.

3). Persepsi adalah penyimpulan

Proses psikologis dari persepsi yang seseorang lakukan akan mengandung kesalahan dalam keadaan tertentu hal ini antara lain disebabkan pengaruh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan.

4). Evaluatif

Persepsi tidak akan pernah obyektif karena seseorang melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan mereflesikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang diinginkan untuk memberikan makna pada obyek persepsi. Persepsi merupakan proses psikologis dalam diri seseorang maka bersifat subyektif. Suatu hal yang tidak terlepas dari interpretasi subyektif adalah evaluasi.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut David Krech dkk. yang dikutip oleh Jalaludin Rachmat (1999:

60) ada dua faktor utama yang menentukan persepsi seseorang, yaitu :

1). Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dari faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau

bentuk stimuli, tetapi karakteristik yang memberikan respon pada stimuli itu.

Faktor fungsional meliputi:

a). Kebutuhan

Kebutuhan sesaat menetap pada diri seseorang akan memengaruhi atau menentukan persepsi seseorang. Dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

b). Kesiapan mental

Suasana mental seseorang akan memengaruhi persepsi seseorang.

c). Suasana emosi

Suasana emosi seseorang baik dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan sangat memengaruhi persepsinya terhadap suatu objek masalah.

d). Latar belakang budaya

Latar belakang budaya dari mana seseorang berasal akan memengaruhi dan menentukan persepsi seseorang terhadap suatu objek rangsangan.

2). Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem individu meliputi antara lain:

a). Kemampuan berfikir

b). Daya tangkap inderawi

c). Seluruh daya tangkap yang ada pada manusia.

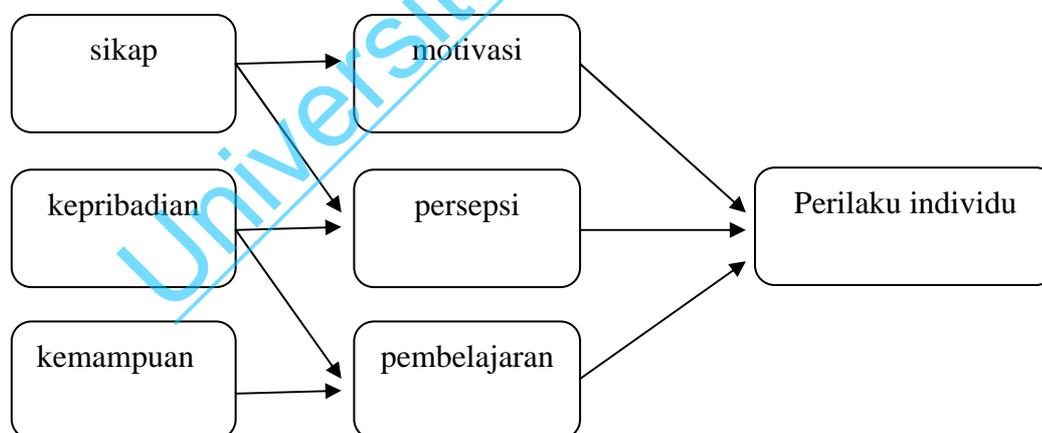
Artinya faktor struktural yang memengaruhi persepsi ini lebih menitikberatkan pada faktor internal individu dalam memandang suatu objek. Sebelum individu tersebut menafsirkan dan menyimpulkan suatu objek, individu

tersebut mengandalkan kemampuan berfikir daya tangkap inderawinya dan seluruh kemampuan yang individu miliki untuk memersepsikan objek tersebut, dalam penelitian ini objek politik.

Menurut Gatara dan Said (2007: 152) persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis antara lain : 1). Asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lalu (yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar); 2). Harapan-harapan budaya; 3). Motivasi (kebutuhan); 4). Suasana hati(*mood*); dan 3). Sikap. Sedangkan Robbins (2002) mengungkapkan bahwa:

"Seseorang yang melihat sesuatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang dilihat,interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat karalteristik yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Dapat dilihat dalam bagan variabel yang mempengaruhi persepsi yang menuju perilaku individu".

Gambar 2.1 Variabel kunci yang mempengaruhi perilaku individu



(Sumber : Robbins. (2002).

Bagan diatas menggambarkan proses terbentuknya suatu persepsi individu dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu, sikap, kepribadian, dan kemampuan. Komponen sikap akan memengaruhi terbentuknya motivasi dan persepsi dan

komponen kepribadian akan mempengaruhi terbentuknya motivasi dan persepsi dan komponen kepribadian akan memengaruhi terbentuknya persepsi dan pembelajaran, sedangkan komponen kemampuan akan memengaruhi terbentuknya pembelajaran. Kemudian motivasi, persepsi dan pembelajaran akan saling memengaruhi satu sama lain sehingga akan terciptanya perilaku individu tersebut.

Mar'at (1981: 22) membagi dua aspek faktor yang memengaruhi persepsi individu, yaitu:

1. Aspek Kognitif
Aspek ini mengacu kepada pengetahuan individu-individu terhadap memandang suatu objek, dalam penelitian ini objek yang dimaksud adalah objek politik. Tahap ini meliputi pemikiran-pemikiran, pengertian dan pengetahuan tentang objek yang dipersepsikan.
2. Aspek Afektif
Merupakan refleksi dari perasaan atau emosi seseorang terhadap objek yang dipersepsikan, dapat berupa pendapat atau penilaian. Persepsi positif dapat berupa dukungan, simpati ataupun rasa suka dan lain-lain. Sedangkan persepsi yang negatif dapat berupa rasa tidak suka, tidak mendukung ataupun menghina.

Dari pemaparan di atas, maka persepsi politik adalah kemampuan individu untuk merasakan, mendengar dan membedakan suatu objek politik yang pernah individu alami dengan menggunakan kemampuan internal maupun kemampuan eksternal. Kemudian proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap, kepribadian dan kemampuan yang memengaruhi terbentuknya motivasi, persepsi dan pembelajaran. Pada akhirnya faktor-faktor tersebut akan menciptakan perilaku individu.

Uraian beberapa ungkapan pengertian tentang persepsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah respon yang berupa ekspresi pendapat yang diberikan secara langsung oleh seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki atau atas masukan yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi seseorang sangat

dipengaruhi oleh kualitas perhatian, ketelitian, pengalaman, pengetahuan, konsistensi dari objek yang dianalisis.

Persepsi masyarakat terhadap seseorang yang akan menjadi kandidat kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, karena mereka akan memberikan kepercayaannya berupa dukungan politik pilihannya, maka persepsi tersebut dapat berupa kesan yang muncul pada seorang kandidat, kriteria yang terpenuhi pada seorang kandidat sehingga hal tersebut menjadi preferensi atau kecenderungan untuk dipilih. Terpenuhi tidaknya persepsi masyarakat tentang kriteria atau syarat yang dimiliki oleh seorang calon nantinya akan menjadikan masyarakat tersebut menjatuhkan pilihannya atau tidak pada calon gubernur/wakil gubernur tersebut.

Sari (2006) menjelaskan bahwa konsep persepsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah suatu pandangan yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek, gejala maupun peristiwa, yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan secara sengaja dengan cara menghubungkan objek, gejala atau peristiwa tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, sistem kepercayaan, adat istiadat yang dimiliki dan sebagainya.

3. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Konsepsi otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah antara lain membawa konsekwensi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (pusat) dan daerah (otonom). Pembagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah, untuk keberlanjutan keutuhan Negara Kesatuan RI. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria atau pendekatan pembagian urusan pemerintahan sebagai berikut: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan atau tingkatan pemerintahan.

Penetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Oktober 2004, sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan adanya perubahan pelaksanaan pemerintahan di daerah, khususnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilu presiden dan wakil presiden pasca Amandemen UUD 1945 dan sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan secara langsung. Begitu pula pemilihan kepala desa atau disebut dengan nama lain, telah dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menyusul kemudian pemilihan gubernur, bupati dan walikota sekarang sudah dipilih secara langsung oleh rakyat, seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan kemajuan sekaligus bentuk perlawanan rakyat atas ketidak setujuan terhadap pemilihan yang dipilih secara elitis oleh DPRD.

Mengenai hal tersebut, Ida (2003: 2) mengungkapkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa yang menjadi pilihan para elit di DPRD itu merupakan harapan dari masyarakat luas. Kalaupun ada kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan dukungan terhadap kepala daerah yang terpilih, maka sebenarnya itu tak dapat dilepaskan dengan rekayasa kelompok kepentingan tertentu, dan atau mereka merupakan bagian dari jaringan para politisi dan figur yang terpilih itu.

Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD, khususnya dalam pemilihan kepala daerah mengandung arti bahwa mekanisme penyerapan aspirasi ditingkat lokal masih terhambat, dan tidak ada acuan mengenai tata cara menyerap serta mengevaluasi sikap masyarakat sebagai aspirasi. Sehingga aspirasi partai politik lebih dikedepankan dibanding aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Pelaksanaan otonomi daerah selama ini, dengan program desentralisasi yang progresif, tidak diikuti secara serta merta dengan program desentralisasi demokratis yang membuka keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Keadaan seperti ini mengandung bahaya dominasi kekuasaan oleh elit lokal dan semakin tidak efektifnya kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Desentralisasi demokratis setidaknya mengandung dua hal yang selalu diabaikan saat ini, yakni faktor partisipasi masyarakat dan faktor pertanggungjawaban publik pemerintah daerah (TA.Legowo, 2003: 2-3).

GTZ Advisory Team, sebagaimana yang di kutip Chandra (2004: 45) menjelaskan bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keseluruhan akses kepada pembuatan keputusan, alokasi sumber-sumber, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas proses pembangunan belum sepenuhnya

mendapat perhatian utama dalam program desentralisasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam sistem keterwakilan saat ini merupakan keterikatan anggota DPRD kepada partai politik dan keterikatan semu kepada masyarakat pemilih. Dalam beberapa kasus, keadaan partai politik seperti kesenjangan sikap antara partai dengan fraksi sering tidak seirama dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya sering terjadi konflik internal partai mengimbas kepada proses pemilihan kepala daerah.

Partisipasi politik masyarakat dan upaya mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban pemimpin pemerintahan kepada masyarakat merupakan kebutuhan dalam proses desentralisasi demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari desentralisasi demokratis.

Sebaik apapun sebuah pemerintahan dirancang, termasuk pemerintahan daerah, maka ia tidak dapat dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warganegara dengan cara terbuka dan jujur untuk semua. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, maka diasumsikan pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi terdistorsi. Rakyat dapat secara langsung mencari, menetapkan dan memilih pemimpinnya sendiri. Pendapat senada dengan ini dikemukakan oleh Sadu Wasitiono (2003: 5) bahwa salah satu di antara hak dasar daerah otonomi yakni hak memilih pemimpinnya sendiri secara bebas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara desentralisasi pemerintahan daerah, demokratisasi dan pemilihan langsung oleh rakyat. Ternyata bahwa kehendak rakyat berupa

partisipasi masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan sebuah pemerintahan yang dirancang.

Manfaat pemilihan kepala daerah langsung bagi pemerintah secara praktis menurut Haris (2003: 2-3) adalah 1) pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai, 2) untuk meningkatkan akuntabilitas para elit politik lokal, 3) menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal, dan 4) memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional. Sementara Sumantri (1987: 125) menyatakan bahwa sistem pemilihan langsung mempunyai sisi positif dan negatifnya. Secara teoretis pemilihan secara langsung lebih demokratis dari pada pemilihan bertingkat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di masa sekarang ini, dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rakyat dapat menggunakan haknya berupa pilihan politik individunya melalui pemilihan kepala daerah langsung. Hal lain yang dapat ditangkap bahwa maka pemilihan kepala daerah langsung lebih dirasakan nuansa demokratisnya, sehingga masyarakat dapat lebih bertanggungjawab dengan konsekwensi pilihannya melalui dukungan terhadap program pembangunan kepala daerah/gubernur dan wakil gubernur pilihannya.

Selanjutnya seorang kepala daerah/gubernur memiliki target kinerja sebagai seorang kepala daerah/gubernur, sebagaimana yang diuraikan oleh Mendagri Ma'ruf (2005) sebagai berikut:

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur disamping sebagai Kepala Daerah juga bertindak selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, mengawasi, melakukan supervisi dan memfasilitasi agar Daerah Kabupaten/Kota mampu menjalankan otonominya secara optimal. gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam hal tertentu diberikan kewenangan untuk membatalkan kebijakan

daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, disamping yang paling utama mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya harus mengedepankan prinsip pengelolaan tata pemerintahan yang baik, antara lain harus profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, efisien dan efektif, serta bermartabat yang diaktualisasikan dalam sistim manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, yang terefleksi dalam pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja, hendaknya hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai mitra kerja terus ditingkatkan dan dievaluasi dalam kontek check and balances sehingga kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat terkait dapat diakomodasikan”.

Mendagri mengarahkan agar gubernur dan wakil gubernur dalam melaksanakan tugasnya agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, belanja APBD harus diutamakan untuk belanja publik yang antara lain guna penyediaan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah.

Kedua, memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, tingkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian dan pedesaan.

Ketiga, melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini termasuk membangun sinergitas hubungan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Untuk itu kembangkan sistim manajemen dengan satu pintu (one stop service) dalam pengembangan investasi.

Keempat, gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah agar melakukan fasilitasi dan pengawasan atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. *Kelima*, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah.

Keenam, memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam penegakan hukum dan upaya peniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut di atas dalam upaya membangun pemerintahan yang baik dan bersih, gubernur diminta agar Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketujuh, menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedelapan, bersama-sama instansi terkait agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial dan politik, serta mengantisipasi secara dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. (ibid, 2005).

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa seorang kepala daerah atau gubernur harus memiliki dua kemampuan. Kemampuan pertama adalah kemampuan akseptabilitas, yaitu dapat diterima oleh masyarakat yang akan memilihnya, dengan kriteria performansi yang di atas rata-rata. Kedua adalah kemampuan kapabilitas, yaitu berupa sikap profesional menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang kepala daerah/gubernur.

4. Keterlibatan Rakyat dalam Memilih

Sebelum tema keterlibatan rakyat dalam pemilihan pilkada langsung, patut juga diperhatikan fungsi partai politik dalam kaitannya dengan perannya dalam negara demokrasi. Miriam Budiarjo (2006), menjelaskan bahwa minimal ada lima fungsi partai politik, pertama partai sebagai sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya. Ketiga, partai sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dan keempat sebagai sarana pengatur konflik, terutama dalam suasana persaingan dan perbedaan pendapat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan fungsi ini, maka pencalonan seorang calon gubernur dan wakil gubernur akan masuk melalui pintu partai politik.

Dalam era globalisasi, kedaulatan rakyat mendapat kedudukan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Kedaulatan rakyat merupakan legitimasi yang paling rasional atas eksistensi dan hak politiknya. Kusnadi dan

Saragih (1998: 238) mengemukakan bahwa rasionalitas merupakan antitesis dari dominasi otoriter yang ada pada abad ke-17, dimana rakyat selalu menjadi korban kekuasaan raja-raja feodal.

Dalam mengimplementasikan ajaran kedaulatan rakyat, dalam istilah kenegaraan dikenal istilah sistem demokrasi atau lebih dikenal dengan sebutan negara demokrasi. Negara demokrasi menempatkan keterlibatan rakyat sebagai pemegang wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara. Bila ditarik dari proses pembentukan dan penyelenggaraan negara semuanya dibangun berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat. Meski demikian, bentuk pengejawantahannya dapat berbeda-beda dalam suatu negara.

Lebih jauh lagi dapat disimpulkan bahwa ciri utama dalam demokrasi adalah adanya keterlibatan dan partisipasi warga negara baik secara langsung maupun tak langsung dalam proses-proses pemerintahan, termasuk didalamnya adalah proses penempatan pejabat penyelenggara pemerintahan.

Sistem demokrasi yang banyak dianut di banyak negara modern menghendaki ada pertanggungjawaban. Tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang lepas dari proses pertanggungjawaban. Oleh karena itu, keinginan untuk mendapat gambaran yang lebih tentang seluk beluk pengisian jabatan kenegaraan seperti jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota perlu lebih dahulu diketahui agar langsung dipertanggungjawabkan kepada publik seyogyanya berada dalam pengawasan langsung publik, pengisiannya senantiasa memerlukan keikutsertaan atau pengukuhan publik.

Dengan adanya perubahan tentang tata cara pemilihan kepala daerah diharapkan akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang

handal, yang tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin, tetapi juga komitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan akan membawa perubahan pada sistem pemerintahan di daerah yang lebih demokratis dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan asas makna demokrasi itu sendiri.

Salah satu bagian penting untuk diketahui oleh masyarakat mengenai tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut yaitu pada tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 36 ayat 1 dikatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 ditetapkan suatu mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam mekanisme tersebut disusun suatu tahapan-tahapan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum dilakukan penyusunan tahapan tersebut, diperlukan beberapa hal yang menjadi syarat utama sebagai berikut:

- a). Adanya bakal calon perseorangan maupun bakal calon dari kaderisasi partai politik
- b). Partai politik dan gabungan partai politik
- c). KPUD

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, ketiga komponen diatas merupakan sub-sub sistem yang bila dirangkai akan merupakan suatu mekanisme proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bakal calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah baik dari luar partai maupun dari golongan kaderisasi partai diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk diajukan yang kemudian ditetapkan oleh KPUD.

5. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih menurut Jack C Plano dalam (Gama & Widarwati, 2008), adalah suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano, 1985: 280).

Sedangkan Bone dan Raney (1971:2-3) menjelaskan perilaku pemilih dengan pernyataan sebagai *In most study of voting behavior, voting behavior is pictured as having the two dimension. Preference.... Can be to measure his approval or disapproval of Democratic and Republican Parties, their perceived stands on issues, and the personal quality of their candidate.... Activity has six main categories: organization activities, organization contributors, opinion leaders, voters, non voters, and apolitical.*

Dengan mengacu pada dua pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih adalah tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilu serta latar belakang seseorang melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara itu meliputi tiga aspek yaitu preferensi (orientasi terhadap isu, orientasi terhadap kualitas personal kandidat, identifikasi partai), aktivitas (keterlibatan dalam partai politik tertentu, keterlibatan dalam setiap kampanye, kehadiran dalam pemungutan suara) dan pilihan terhadap salah satu partai politik tertentu.

Ada dua macam teori *voting behaviour* yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab besar. *Pertama*, pendekatan voting dari mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia's University Bureau of Applied Social Science. *Kedua*, pendekatan voting dari mazhab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans Survey Research Center (Gaffar, 1992: 4-9).

David Denver menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Inggris. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok okupasi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Jenis kelamin juga merupakan variabel sosiologis yang berhubungan dengan perilaku pemilih. Kajian *voting behavior* di Eropa pada dekade 1970-an menunjukkan bahwa wanita lebih suka mendukung partai borjuis daripada partai sosialis, setuju dengan administrasi (birokrat), menghindari pemihakan pada ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, mendukung partai moderat. Hubungan isu-isu politik dan penilaian kandidat dengan perilaku pemilih juga dikaji oleh Gerald

Pomper dalam karyanya yang berjudul *Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior* (1973). Dengan membandingkan tiga kali hasil penelitiannya pada pemilu 1956, 1964 dan 1972 Pomper mengemukakan dalam salah satu kesimpulannya sebagai berikut: “bahwa posisi isu-isu politik dalam menentukan voting meningkat tajam, baik dampaknya secara langsung terhadap pemilih maupun secara tidak langsung melalui penilaian kandidat” (Asfar,1996).

Menurut Nimmo (1989:187-197), ada empat alternatif dalam memikirkan bagaimana pemberi suara bertindak yaitu:

a. Pemberi Suara Yang Rasional

Menurut Louis Anthony Dexter (1969) dalam bukunya *The Sociology and Politics of Congress* yang dikutip oleh Dan Nimmo, pemberi suara yang rasional pada hakekatnya mempunyai aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara.

b. Pemberi Suara Yang Reaktif

Gambaran tentang pemberi suara yang reaktif diturunkan dari asumsi fisikalistik bahwa manusia bereaksi terhadap rangsangan dengan cara pasif dan terkondisi. Dalam kampanye politik, kandidat dan partai menyajikan isyarat yang menggerakkan para pemilih dengan memicu faktor-faktor jangka panjang yang menetapkan arah perilaku memberikan suara. Faktor-faktor jangka panjang tersebut terutama adalah faktor-faktor sosial dan demografi seperti pekerjaan, pendidikan, pendapatan, usia, jenis kelamin, ras, agama, wilayah tempat tinggal dan sebagainya. Di samping faktor-faktor sosial dan demografi pada studi-studi tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an menambahkan konstruk mentalistik (sikap,

predisposisi, identifikasi, kesetiaan, dan sebagainya) sebagai variabel perantara dalam urutan penyebab-akibat.

c. Pemberi Suara Yang Responsif

Ilmuwan politik Gerald Pomper membuat gambaran tentang pemberi suara yang responsif sebagai berikut apabila karakter pemberi suara yang reaktif itu tetap, stabil, dan kekal, maka karakter pemberi suara yang responsif adalah impermanen, berubah mengikuti waktu, peristiwa politik, dan pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan para pemberi suara.

d. Pemberi Suara Yang Aktif

Pemberi suara yang aktif adalah pemberi suara yang bertindak terhadap objek berdasarkan makna objek itu bagi mereka. Dengan demikian individu yang aktif itu menghadapi dunia yang harus diinterpretasikan dan diberi makna untuk bertindak bukan hanya lingkungan pilihan yang telah diatur sebelumnya, yang terhadapnya orang menanggapi karena sifat atribut dan atau sikap individu atau rangsangan yang terbatas.

Huntington dan Nelson (1994: 4) mendefinisikan partisipasi politik sebagai: "Kegiatan yang dilakukan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sedangkan Budiardjo (1996:183) mengartikan partisipasi politik sebagai: kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan

pendekatan atau hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Partisipasi politik masyarakat yang paling rendah menurut Rush & Althoff (1983: 124) adalah *voting* atau pemberian suara karena hanya menuntut keterlibatan minimal. Tindakan seseorang dalam menentukan pilihannya dalam pemilu bagi suatu negara memiliki makna yang berarti sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pemberian suara dalam tahapan pemilu dipandang sebagai tahapan yang sangat menentukan dalam proses demokrasi.

Pilkada lokal maupun pemilihan presiden, memiliki banyak fenomena yang menarik untuk dicermati. Contohnya dalam pilpres 2004 yang lalu, mengapa warga Muhammadiyah banyak memilih kandidat Amien Rais. Atau mengapa Jusuf Kalla unggul di Sulawesi Selatan, sementara Megawati unggul di Bali. Untuk kasus lokal pilkada Kota Bandar Lampung 2005, faktor apa yang dimainkan Eddy Sutrisno sehingga dapat mengalahkan kandidat Abdul Hakim, padahal pada putaran pertama dia hanya pemenang kedua. Tentu masih banyak lagi kasus serupa yang dapat diungkap.

Pertanyaannya adalah mengapa seseorang melakukan tindakan atas pilihan politiknya, sedangkan yang lain tidak? Mengapa pilihan sekelompok orang di Lampung Timur cenderung konsisten, sementara itu di Lampung Selatan misalnya berubah-ubah. Faktor apa yang memengaruhi seseorang menentukan pilihan politiknya? Beberapa pertanyaan ini masih dapat diperpanjang dengan persoalan senada. Substansinya, bagaimana menjelaskan fenomena itu terhadap perilaku pemilih atau *voting behaviour* dalam pilkada.

Beberapa negara yang telah memiliki tradisi panjang dalam pemilu, seperti AS, Inggris, dan Prancis, pendekatan *voting behavior* sudah sangat berkembang. Hal itu disebabkan oleh banyak kajian yang berkaitan dengan perilaku pemilih di negara-negara tersebut. Kajian terhadap perilaku pemilih kini juga berkembang di Jepang, India, dan Korea Selatan. Ketiganya adalah negara di Asia yang sudah berkembang kehidupan demokrasinya.

Persoalannya, bagaimana melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka terhadap kandidat dalam pilkada dan terhadap partai dalam pemilu. Secara sejarah, menurut FS Swantoro (2006), penjelasan teoretis tentang *voting behavior* ini cenderung didasarkan pada dua model, yakni lewat pendekatan sosiologis dan psikologis. Di lingkungan ilmuwan sosial di AS, pendekatan sosiologis awalnya dikembangkan oleh mazhab Columbia, yaitu *The Columbia School of Electoral Behavior*. Sementara itu pendekatan psikologis lebih banyak dikembangkan oleh mazhab Michigan, *The Michigan Survey Research Center*. Perbedaannya, jika mazhab Columbia lebih difokuskan pada pendekatan sosiologis, mazhab Michigan difokuskan pada faktor psikologis para pemilih dalam menentukan pilihannya.

Pendekatan untuk menganalisis perilaku pemilih yang diungkapkan oleh Kavanagh (1983) dalam buku *Political Science and Political Behavior*, yakni pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Pendekatan struktural dapat memperlihatkan kegiatan pemilih ketika memilih partai sebagai produk dari konteks struktur yang luas, seperti struktur sosial masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan program yang dimunculkan partai-partai peserta pemilu atau pilkada. Model ini menunjukkan bahwa tingkah

laku politik seseorang termasuk dalam penentuan pilihan ditentukan oleh pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku.

Pendekatan sosiologis memiliki kesamaan dengan pendekatan struktural. Bedanya hanya lebih menempatkan kegiatan memilih pada konteks sosial. Melalui pendekatan ini, tingkah laku politik seseorang akan dipengaruhi identifikasi diri terhadap kelompok, termasuk norma yang dianut kelompok tersebut. Pendekatan struktural menunjukkan mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain masih dimungkinkan. Oleh karena itu, pilihan seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Melalui pendekatan ini dapat dibuat peta masyarakat. Hal itu kemudian dimanfaatkan sebagai basis dukungan terhadap parpol atau kandidat kepala daerah.

Pendekatan ekologis relevan bila dalam daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat memengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap perubahan pilihan mereka. Hasil Pemilu tahun 1999 memperlihatkan peta politik di kawasan barat Indonesia didominasi oleh PDI-P dan Partai Golkar mendominasi kawasan timur Indonesia.

Pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini menyatakan tingkah laku pemilih akan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Misalnya, sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang.

Pendekatan ini meyakini bahwa tingkah laku individu akan membentuk norma kepercayaan individu.

Pilihan rasional. Model ini sebenarnya kelanjutan dari pendekatan psikologis sosial yang ingin melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai produk hitungan untung-rugi. Namun pertimbangannya bukan ongkos memilih, melainkan perolehan total suara yang dapat memengaruhi hasilnya. Pertimbangan itu sering digunakan para pemilih yang mencalonkan diri agar dapat dipilih menjadi anggota legislatif. Bagi mayoritas pemilih, pertimbangan untung-rugi ini digunakan untuk membuat keputusan terhadap partai yang dipilih, termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Di sini, faktor pendidikan dan kesadaran pemilih akan menentukan sekali. Penganut model ini sering mencoba meramalkan tindakan manusia berdasarkan pada asumsi sederhana, yakni setiap orang berusaha keras mencapai apa yang dinamakan *self-interest* (Swantoro, 2006).

Rumadi (2007) menjelaskan perilaku pemilih lebih rinci dan taktis. Perilaku pemilih (*political behaviour*) dalam ilmu politik menjadi wilayah studi tersendiri. Ini terkait erat dengan preferensi apa yang menjadi dasar bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Rumadi (2007) mengkategorikan perilaku pemilih ke dalam lima kelompok, yaitu; *Pertama*, penentuan pilihan karena kesamaan ideologi dengan kandidat. Namun, dalam kehidupan Indonesia sekarang dengan politik aliran semakin cair, ideologi agaknya tidak lagi menjadi faktor determinan, di samping untuk mencari garis persamaan ideologis sekarang ini juga bukan hal mudah karena arus pragmatisme politik yang demikian kuat.

Kedua, pilihan berdasarkan pada afiliasi partai politik. Kandidat yang didukung partai politik pilihannya, kepada dialah pilihan dijatuhkan. Pemilih yang berperilaku seperti ini agaknyanya lebih banyak, sehingga para kandidat berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh dukungan partai politik sebanyak mungkin (bandingkan dengan temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Rasionalitas Pilkada DKI, Mei 2007).

Ketiga, pilihan karena kesamaan etnisitas. Banyak yang mengasumsikan, etnisitas akan turut menentukan pilihan politik seseorang, sehingga salah satu kandidat Pilkada DKI menjadikan isu etnisitas (Betawi) sebagai penarik suara. Meski etnisitas ikut menentukan, tapi dalam Pilkada DKI hal ini tidak terlalu signifikan.

Keempat, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. Pragmatisme ini muncul karena banyak hal, seperti politik uang, kedekatan dengan kandidat, dan sebagainya. Politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tapi juga dalam bentuk-bentuk lain yang lebih halus agar tidak mengesankan adanya praktek pembelian suara.

Kelima, pilihan karena program dan integritas kandidat. Pemilih yang rasional biasanya melihat sisi ini. Tapi tidak banyak pemilih yang menggunakan hal ini sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Nursal dalam Komariah (2005) menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pemilih sebagai berikut:

a) *Social Imagery* atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial)

Social imagery adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih mengenai keberadaannya di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik.

b) Identifikasi Partai

Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Identifikasi partai menunjukkan seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama.

c) *Emotional Feelings* (Perasaan Emosional).

Emotional feeling adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.

d) *Candidate Personality* (Citra Kandidat).

Candidate personality mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan *Candidate personality* adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.

e) *Issues and Policies* (Isu dan Kebijakan Politik).

Komponen *issues and policies* mempresentasikan kebijakan atau program yang di janjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Platform dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam

negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.

f) *Current Events* (Peristiwa Mutakhir).

Current events mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Current events* meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Masalah domestik antara lain tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.

g) *Personal Events* (Peristiwa Personal).

Personal events mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, terlibat kasus kriminalitas, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan sebagainya.

h) *Epistemic Issues* (Faktor-faktor Epistemik).

Epistemic issues adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru. *Epistemic issues* sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena (1) kesamaan ideologis, (2) afiliasi partai politik, (3) kesamaan

etnisitas, (4) pragmatisme, dan (5) program dan integritas kandidat. Namun dalam kenyataannya, pemilih dimungkinkan menjatuhkan pilihan ditentukan juga oleh kombinasi dan perpaduan dari beberapa unsur di atas. Adapun yang ideal adalah pemilih cerdas seharusnya menjatuhkan pilihannya didasarkan pada rekam jejak kandidat, integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan.

Dapat dibuat sebagai kerangka teori bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengubah model pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung, yang sebelumnya melalui perwakilan DPRD. Rakyat akan menjadi penentu terpilih atau tidaknya seorang kandidat kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menyehatkan proses demokratisasi untuk menuju upaya *good governance*, melalui upaya peningkatkan akuntabilitas para elit politik lokal, menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal, dan memperkuat serta meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional.

Sebagai konsekuensinya, maka bagi para kandidat yang akan terlibat dan ingin memenangkan pemilihan kepala daerah langsung, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, harus mengerti dan persepsi masyarakat yang akan menjadi aktor utama dalam memilih kandidat kepala daerah.

Masyarakat menjatuhkan pilihan politiknya terhadap kandidat dalam pilkada berdasarkan adanya kesamaan ideologis, afiliasi partai politik, kesamaan etnisitas, pragmatisme, dan program dan integritas kandidat. Namun dalam kenyataannya, pemilih dimungkinkan menjatuhkan pilihan berdasarkan juga oleh kombinasi dan perpaduan dari beberapa unsur di atas. Sementara yang ideal adalah sebagai pemilih cerdas seharusnya masyarakat menjatuhkan pilihannya

didasarkan pada rekam jejak kandidat, integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan.

B. Kerangka Teori

Secara umum teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik dan teori desentralisasi politik. Kedua teori pokok tersebut yang menjadi bingkai teoritis bagi teori-teori pendukungnya. Kajian persepsi masyarakat tentang kepemimpinan daerah di era otonomi daerah mencakup landasan teori pilkada secara langsung, teori partai politik, teori tentang persepsi dan teori tentang perilaku pemilih. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk memilih secara langsung kepala daerahnya, sehingga konteks aturan yang berlaku dalam pilkada merupakan jabaran atau turunan dari aturan yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya pilkada maka kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada pemerintah pusat, tetapi dapat didistribusikan kepada daerah-daerah.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo (2000) dalam Asshiddiqie (2008), meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Sedangkan King dan Robinson (1994: 36) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana kita melihat, mendengarkan, merasakan, mengecap dan mencium dunia sekitar kita. Persepsi dapat didefinisikan juga sebagai segala sesuatu hal yang dialami oleh manusia. Artinya persepsi memfokuskan pada sisi yang dialami oleh individu manusia itu sendiri yaitu bagaimana individu-individu manusia dapat melihat, mengecap, mendengarkan, merasakan dan mencium fenomena yang terjadi dan lebih menitikberatkan pada apa yang dialami oleh individu manusia itu sendiri.

Dapat dipahami bahwa persepsi adalah kesan sebagai akibat dari adanya suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif. Menurut Mar'at (1981 : 32) persepsi memiliki sifat-sifat yaitu:

1). Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan makna dari objek atau peristiwa, seseorang harus memiliki dasar untuk melakukan interpretasi. Dasar ini biasanya ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan objek atau peristiwa tersebut atau hal yang menyerupai.

2). Persepsi merupakan proses yang selektif

Ketika memersepsikan sesuatu, seseorang cenderung melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu dari objek dan menyebabkan yang lain. Dalam hal ini biasanya seseorang memersepsikan apa yang seseorang inginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri kita dan menyebabkan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai-nilai atau keyakinan seseorang tersebut.

3). Persepsi adalah penyimpulan

Proses psikologis dari persepsi yang seseorang lakukan akan mengandung kesalahan dalam keadaan tertentu hal ini antara lain disebabkan pengaruh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan.

4). Evaluatif

Persepsi tidak akan pernah obyektif karena seseorang melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang diinginkan untuk memberikan makna pada obyek persepsi. Persepsi merupakan proses psikologis dalam diri seseorang maka bersifat subyektif. Suatu hal yang tidak terlepas dari interpretasi subyektif adalah evaluasi.

Sementara itu Rumadi (2007) menjelaskan perilaku pemilih lebih rinci dan taktis. Perilaku pemilih (*political behaviour*) dalam ilmu politik memang menjadi wilayah studi tersendiri. Ini terkait erat dengan preferensi apa yang menjadi dasar bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Kategori perilaku pemilih diklasifikasikan kedalam lima kelompok, yaitu; *Pertama*, penentuan pilihan karena kesamaan ideologi dengan kandidat. Namun, dalam kehidupan Indonesia sekarang dengan politik aliran semakin cair, ideologi agaknya tidak lagi menjadi faktor determinan, disamping untuk mencari garis persamaan ideologis sekarang ini juga bukan hal mudah karena arus pragmatisme politik yang demikian kuat. *Kedua*, pilihan didasarkan pada afiliasi partai politik. Kandidat yang didukung partai politik pilihannya, kepada dialah pilihan dijatuhkan. Pemilih yang berperilaku seperti ini agaknya lebih banyak, sehingga para kandidat berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh dukungan partai politik sebanyak mungkin. *Ketiga*, pilihan karena kesamaan etnisitas. Banyak yang mengasumsikan, etnisitas

akan turut menentukan pilihan politik seseorang, sehingga salah satu kandidat Pilkada menjadikan isu etnisitas sebagai penarik suara. Muncul asumsi, meski etnisitas ikut menentukan, tapi dalam Pilkada hal ini tidak terlalu signifikan. *Keempat*, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. Pragmatisme ini muncul karena banyak hal, seperti politik uang, kedekatan dengan kandidat, dan sebagainya. Politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tapi juga dalam bentuk-bentuk lain yang lebih halus agar tidak mengesankan adanya praktek pembelian suara. *Kelima*, pilihan karena program dan integritas kandidat. Pemilih yang rasional biasanya melihat sisi ini. Tapi tidak banyak pemilih yang menggunakan hal ini sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena (1) kesamaan ideologis, (2) afiliasi partai politik, (3) kesamaan etnisitas, (4) pragmatisme, dan (5) program dan integritas kandidat. Namun dalam kenyataannya, pemilih dimungkinkan menjatuhkan pilihan ditentukan juga oleh kombinasi dan perpaduan dari beberapa unsur di atas. Adapun yang ideal adalah pemilih cerdas seharusnya menjatuhkan pilihannya didasarkan pada rekam jejak kandidat, integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan.

C. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian diukur dengan indikator-indikator yang meliputi Usia, adalah usia responden pada saat penelitian dilakukan yaitu dengan

menghitung jumlah tahun hidup responden sejak lahir sampai pada saat penelitian ini dilakukan. Pekerjaan, adalah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam keseharian pada responden yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan, adalah jumlah uang yang diterima responden setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya. Tingkat pendidikan, adalah tingkat proses belajar mengajar yang tertinggi yang pernah ditempuh oleh responden hingga tamat atau tidak tamat di sekolah-sekolah formal. Agama (kepercayaan) adalah keyakinan yang dianut oleh responden dalam menghubungkan dirinya dengan Tuhan Sang Pencipta. Persepsi terhadap pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, adalah pandangan yang diberikan seseorang responden terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang meliputi pengetahuan tentang sumber informasi, waktu pemilihan dan pelaksanaan, pengenalan pada calon, pengenalan pada partai pengusung, pengalaman responden, dalam mengikuti pemilihan umum dan rencana memilih calon.

Universitas Terbuka

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain dan Alur Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan survei dengan metode deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian yaitu masyarakat yang memiliki hak pilih terkait persepsi mereka terhadap sosok gubernur/wakil gubernur sebagai calon pemimpin yang akan dipilih. Sedangkan yang dimaksud pendekatan kuantitatif adalah metode memahami objek penelitian dengan berupaya menjelaskan persepsi masyarakat menggunakan perhitungan statistik dan statistik deskriptif. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya dipaparkan secara deskriptif dan penelitian ini akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini (Effendy, 2003).

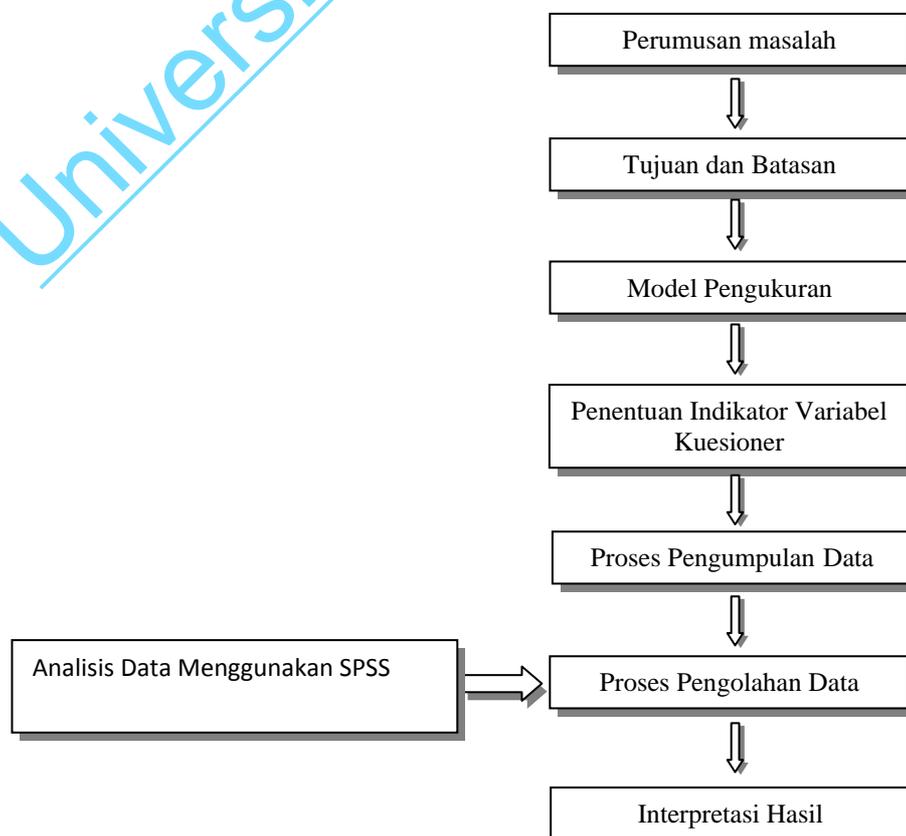
Metode penelitian survei adalah usaha pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian. Penelitian dilakukan secara meluas dan berusaha mencari hasil yang segera dapat dipergunakan untuk suatu tindakan yang sifatnya deskriptif yaitu melukiskan hal-hal yang mengandung fakta -fakta, klasifikasi dan pengukuran yang akan diukur adalah fakta yang fungsinya merumuskan dan melukiskan apa yang terjadi (Ali,1997).

Berkaitan dengan pengertian metode deskriptif, dijelaskan bahwa penelitian apabila ditinjau dari hadirnya variabel dan saat terjadinya, maka penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan

sekarang (sedang terjadi) adalah penelitian deskriptif yang artinya menggambarkan atau membeberkan (Arikunto, 1998).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Nazir (1988) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pengertian pakar di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa metode survei deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan maksud dari penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap calon dan wakil calon gubernur. Sedangkan alur dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.1 Alur Penelitian



B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat terhadap pilkada gubernur dan wakil gubernur di provinsi Lampung. Keterbatasan waktu, dana, dan tenaga mengakibatkan analisis data hanya berdasarkan data kuisisioner yang diisi oleh masyarakat. Namun demikian analisis dari data kuisisioner ini juga didukung oleh teori-teori dari metode kualitatif yaitu dari kepustakaan yang mempertajam analisa kajian ini. Penelitian ini terbatas pada populasi provinsi Lampung, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lainnya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk provinsi Lampung yang pada saat penelitian ini dilakukan berstatus sebagai pemilih atau mempunyai hak pilih, yaitu warga negara yang berusia di atas tujuh belas tahun atau sudah menikah. Sedangkan sampel adalah individu yang terpilih sebagai responden dengan menerapkan prinsip probabilitas dalam penarikan sampel.

Tabel 3.1. Proporsi jumlah sampel per kabupaten/kota

No	Kab/Kota	Jumlah Responden
1	Bandar Lampung	50
2	Lampung Selatan	40
3	Lampung Barat	20
4	Lampung Timur	50
5	Lampung Tengah	60
6	Tanggamus	50
7	Metro	10
8	Pesawaran	20
9	Tulang Bawang	50
10	Way Kanan	20
11	Lampung Utara	30
	Total	400

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka. Peneliti menggunakan teknik *multistage random sampling* dalam pengambilan sampel. Penggunaan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden, dan dilakukan secara bertingkat.

Fase pertama yang dilakukan adalah populasi provinsi Lampung di strata atas dasar populasi di masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Lampung sehingga diperoleh sampel dalam jumlah proporsional di masing-masing kabupaten. Semua kabupaten dan kota akan terjaring dalam survei ini.

Fase kedua adalah menetapkan desa/kelurahan atau yang setara sebagai *primary sampling unit* (PSU), dan karena itu random sistematis dilakukan terhadap desa/kelurahan di masing-masing kabupaten sesuai dengan proporsi populasi. Masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT) atau yang setara, dan kemudian dipilih sebanyak 5 RT secara random. Masing-masing RT terpilih kemudian didaftar Kartu Keluarga (KK), untuk kemudian dipilih dua keluarga secara random. Pada dua keluarga yang terpilih, didaftar anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak pilih. Bila dalam keluarga pertama yang terpilih menjadi responden adalah perempuan, maka pada keluarga yang kedua di RT yang sama yang didaftar harus laki-laki, demikian seterusnya.

Prosedur pengumpulan dan validasi data yang harus dipenuhi dalam penelitian sebagai berikut ini:

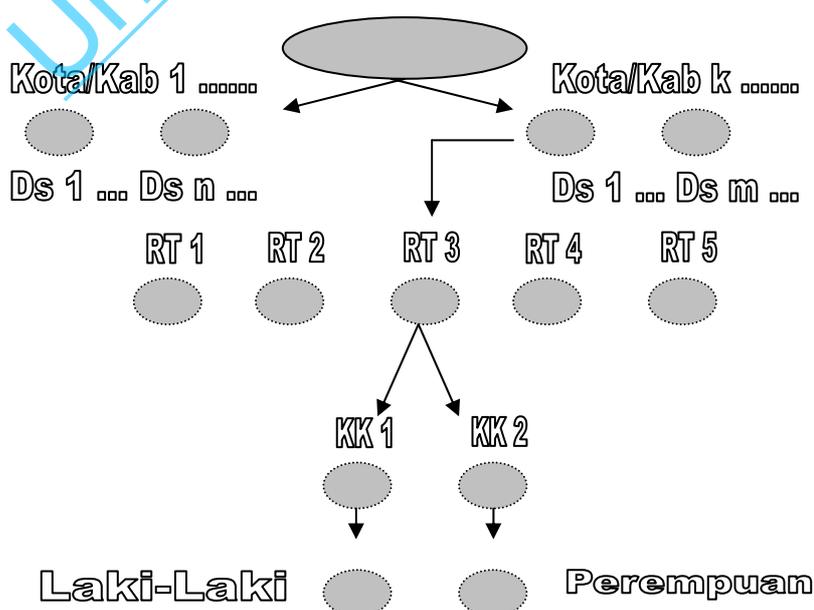
1. Jumlah responden 400 (margin of error +/- 4,9 % pada tingkat kepercayaan 95%)
2. Pengumpulan data: Wawancara terstruktur melalui tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner
3. Kendali mutu survei: Pewawancara tenaga profesional yang telah dilatih
4. Validasi data: Perbandingan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Propinsi Lampung 2007.

Tabel 3.2 Proporsi penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Lampung

No.	Kab./Kota	KK	Penduduk	Penduduk	Potensi Pemilih	Persentase (%)
1	B.Lampung	176.753	825.478	900.749	617989	11,69
2	Lambar	101.742	410.892	426.672	287436	5,44
3	Lampura	134.582	575.997	634.791	429329	8,12
4	Lamsel	302.116	1.174.651	1.312.665	864873	16,36
5	Lamteng	267.312	1.085.151	1.127.525	800000	15,14
6	Lamtim	229.888	935.253	948.571	668598	12,65
7	Metro	32.770	152.517	152.876	110385	2,09
8	Tanggamus	160.105	871.556	896.243	614363	11,62
9	Tulang Bawang	211.709	896.637	999.580	638553	12,08
10	Way Kanan	79.036	372.756	390.000	253730	4,80
	Jumlah	1.696.013	7.300.888	7.789.672	5285256	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan Propinsi Lampung 2007

Gambar 3.2 Tahapan Penarikan Sampel



D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ingin didapatkan dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan kajian penelitian.

1. Data dan Instrumentasi

a. Data

Data primer yakni data tentang karakteristik personal dan persepsi tentang pemilihan gubernur secara langsung yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Selain itu juga akan dikumpulkan data sekunder untuk memperkuat data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber serta instansi yang terkait.

b. Instrumentasi

Instrumen yang dipergunakan adalah kuesioner yang dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor karakteristik personal, meliputi umur, tingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. *Kedua*, pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang meliputi pengetahuan tentang sumber informasi, waktu pemilihan dan pelaksanaan, pengenalan pada calon, pengenalan pada partai pengusung, pengalaman responden dalam mengikuti pemilihan umum, dan rencana memilih calon.

2. Definisi Operasional dan Pengukuran

a. Definisi Operasional

- 1) Usia, adalah usia responden pada saat penelitian dilakukan yaitu dengan menghitung jumlah tahun hidup responden sejak lahir sampai pada saat penelitian ini dilakukan.
- 2) Pekerjaan, adalah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam keseharian pada responden yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Penghasilan, adalah jumlah uang yang diterima responden setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya.
- 4) Tingkat pendidikan, adalah tingkat proses belajar mengajar yang tertinggi yang pernah ditempuh oleh responden hingga tamat atau tidak tamat di sekolah – sekolah formal.
- 5) Agama (kepercayaan), adalah keyakinan yang dianut oleh responden dalam menghubungkan dirinya dengan Tuhan Sang Pencipta.
- 6) Persepsi terhadap pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, adalah pandangan yang diberikan seseorang responden terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang meliputi pengetahuan tentang sumber informasi, waktu pemilihan dan pelaksanaan, pengenalan pada calon, pengenalan pada partai pengusung, pengalaman responden, dalam mengikuti pemilihan umum dan rencana memilih calon.

3. Pengukuran

Alat ukur penelitian ini yang menggunakan daftar berbentuk angket dengan tingkat pengukuran ordinal, kategori jawaban terdiri atas 5 tingkatan. Untuk analisis secara kuantitatif, maka alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor dari nilai 1 sampai 5 sebagai berikut:

- a. Ada lima alternatif jawaban untuk variabel faktor personal dan situasional individu yaitu:

5 = Sangat sering
 4 = Sering
 3 = Jarang
 2 = Jarang sekali
 Z = Tidak pernah

- b. Ada lima alternatif jawaban untuk variabel sikap responden terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yaitu:

4 = Sangat setuju
 3 = Setuju
 2 = Cukup setuju
 1 = Kurang setuju
 Z = Tidak menjawab.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan ditabulasi dalam bentuk tabel frekuensi dan dianalisis berdasarkan analisis deskriptif ekplanatoris. Oleh karena tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, maka peneliti menggunakan software SPSS Versi 12 dan memakai analisis statistik *Non Parametrik test Chi- Square. Test Chi-Square* (?) dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang

signifikan antara banyak yang diamati (*observed*) dari obyek atau jawaban yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan (*expected*) berdasarkan hipotesis nol (Siegel,1994). *Test Chi-Square* (?) ini dipergunakan karena dianggap tepat untuk menganalisa data – data yang terkait dalam jawaban responden.

Analisis yang dipergunakan untuk mengolah data penelitian adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah analisis menggunakan rumus-rumus statistik guna mendapatkan gambaran tentang hal yang akan diteliti. Adapun tahap analisis data kuantitatif adalah dengan memberikan kode-kode pada item pertanyaan (koding) beserta kategori penilaian pada masing-masing jawaban responden sehingga mempermudah dalam proses perhitungan dan penerapan rumus-rumus statistik. Langkah berikutnya melakukan decoding dan memberi tafsiran dan analisis terhadap hasil penghitungan statistik dan hasil analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah mengelompokkan data-data yang diperoleh dalam indikator-indikator penelitian, kemudian digali secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokkan menurut variabel masing-masing kemudian dicari pola-pola yang terjadi disertai dengan penjelasan sehingga diperoleh gambaran obyek penelitian secara lengkap berdasarkan pokok kajian penelitian.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan program SPSS versi 12.0. Analisis data mencakup analisis deskriptif (frekuensi, persentase, dan sebagainya), keseluruhan variabel, analisis tabel silang dari beberapa variabel yang diteliti.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan sejumlah data hasil penelitian. Penyajian data diklasifikasikan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yaitu peran serta masyarakat dalam menentukan calon pemimpin pemerintahan di daerah, faktor-faktor yang akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan kepala daerah yang akan dipilih, serta persepsi masyarakat tentang seorang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih. Pada bagian awal akan dipaparkan lebih jelas mengenai responden, berikut akan dideskripsikan identitas responden menurut jenis kelamin, usia, suku, agama, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan organisasi.

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini diungkapkan untuk melihat lebih dalam karakteristik pemilih yang menentukan pilihan politiknya. Ada beberapa pendekatan model yang mendasari karakteristik responden/pemilih diungkapkan yang pertama adalah model sosiologis. Model Sosiologis adalah model paling awal dalam tradisi studi perilaku memilih. Model ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan. Seorang pemilih memilih partai tertentu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik sosiologis partai tersebut. Seorang pemilih dengan latar belakang kelas sosial bawah (dilihat dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan kesadaran akan posisi kelas sosial)

cenderung akan memilih partai politik yang dipandang memperjuangkan perbaikan kelas sosial mereka. Atau yang beragama Islam, memilih partai Islam atau partai yang memperjuangkan kepentingan Islam. Faktor sosiologis yang penting mempengaruhi keputusan memilih sebuah partai politik adalah agama.

Sebuah partai politik yang punya platform keagamaan yang relatif sama dengan karakteristik kebergamaan pemilih cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Terkait dengan masalah kelas sosial dan sentimen keagamaan, aspek kedaerahan juga dipercaya sebagai faktor sosiologis yang mempengaruhi perilaku pemilih. Partai politik yang punya asal-usul atau keterikatan dengan daerah tertentu cenderung akan didukung oleh pemilih dari daerah bersangkutan. Walaupun dilihat dari etnik berbeda, seorang calon pejabat publik yang tinggal, atau biasa memperjuangkan kepentingan daerah tertentu, cenderung didukung oleh pemilih dari daerah bersangkutan (Eriyanto, 2007). Uraian faktor sosiologis meliputi ciri responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan, suku, agama, pekerjaan, pendidikan dan latar belakang organisasi dijelaskan sebagai berikut.

1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Perempuan	200	50,0
2.	Laki-laki	200	50,0
	Total	400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas, diambil sampel responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 200 (50%) responden sebanding dengan jumlah responden berjenis kelamin perempuan yaitu 200 (50%) responden.

2. Karakteristik Responden Menurut Kelompok Usia

Karakteristik responden menurut usia disajikan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Menurut Kelompok Usia

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	17-24 tahun	60	15,0
2.	25-30 tahun	72	18,0
3.	31-35 tahun	66	16,5
4.	36-40 tahun	56	14,0
5.	41-45 tahun	41	10,3
6.	46-50 tahun	26	6,5
7.	51-55 tahun	27	6,8
8.	56 tahun dst	52	13,0
Total		400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.2 maka diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 72 orang (18%) adalah pemilih yang berusia antara 25-30 tahun. Sedangkan kelompok yang paling sedikit adalah pemilih berusia 46-50 tahun yaitu 26 orang (6,5%). Dilihat dari data ini sebagian besar masyarakat pemilih berada pada usia remaja dan dewasa.

3. Karakteristik Responden Menurut Suku

Karakteristik responden menurut suku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Identitas Responden Menurut Suku

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Lainnya	19	4,75
2	Lampung	93	23,4
3	Palembang	24	6,0
4	Sunda	32	8,0
5	Jawa	227	57,0
6	Minang	3	0,8
7	Jaseng/Banten	2	0,5
Total		400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.3 maka dijelaskan bahwa ada tiga suku dominan responden, dimulai dari yang terbesar yaitu suku Jawa 227 orang (57%), suku Lampung 93 orang (23,4%) dan suku Sunda 32 orang (8%).

4. Karakteristik Responden Menurut Agama

Pilkada sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk menyelidiki lebih dalam kaitan antara agama dengan perilaku pemilih. Arena Pilkada memberi kesempatan lebih baik bagi peneliti di bidang perilaku pemilih untuk melihat kaitan antara agama dengan pemilih Pilkada sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk menyelidiki lebih dalam kaitan antara agama dengan perilaku pemilih. Arena Pilkada memberi kesempatan lebih baik bagi peneliti di bidang perilaku pemilih untuk melihat kaitan antara agama dengan pemilih. Identitas responden menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Menurut Agama

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Lainnya	1	0,3
2.	Islam	379	95,5
3.	Protestan	4	0,5
4.	Khatolik	11	2,5
5.	Budha	3	0,8
6.	Hindu	2	0,5
	Total	400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa agama mayoritas responden dengan presentasi paling besar adalah Islam, yaitu 379 orang (95,5%) sisanya adalah agama lainnya. Di Indonesia, faktor agama juga banyak dikaji oleh pengamat dan peneliti perilaku politik. Alasannya, agama masih dipandang penting oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang menjadi pemeluk agama yang taat. Fokus yang banyak diteliti adalah apakah

pemilih dengan latar belakang agama tertentu cenderung memilih partai atau kandidat dengan agama yang sama dengan dirinya. Pemilih Islam, misalnya apakah cenderung memilih partai atau kandidat yang berlatar belakang Islam dibandingkan agama lain. Studi Gaffar (1992) menunjukkan ada hubungan kuat antara orientasi agama pemilih dengan partai yang dipilih. Studi yang dilakukan oleh Liddle dan Mujani menghasilkan temuan hubungan antara agama dengan perilaku memilih memang positif, dalam arti menjadi seorang Muslim cenderung untuk memilih partai Islam dan sebaliknya menjadi seorang non-Muslim cenderung memilih partai non Islam (Eriyanto, 2008).

5. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

Identitas responden menurut pekerjaan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	22	5,5
2.	Petani	179	45,0
3.	Pegawai swasta	11	2,75
4.	Pedagang	18	4,5
5.	Wiraswasta	47	11,8
6.	Guru (negeri & swasta)	8	2,0
7.	Buruh Pabrik	4	1,0
8.	Belum Bekerja	11	2,8
9.	Ibu Rumah Tangga	66	16,6
10.	Pelajar/Mahasiswa	13	3,3
11.	Buruh Bangunan	7	1,8
12.	Supir/ojek	1	,3
13.	Tidak tetap	3	,8
14.	PNS	10	2,5
	Total	400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai petani yaitu 179 orang (45%), kemudian diikuti profesi ibu rumah tangga 66 orang (16,6%).

6. Karakteristik Responden Menurut Penghasilan

Karakteristik responden menurut penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Karakteristik Responden Menurut Penghasilan

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	0-99.000	64	18,6
2.	Antara 100.000-199.000	61	17,7
3.	Antara 200.000-299.000	47	13,6
4.	Antara 300.000-399.000	43	12,5
5.	Antara 400.000-500.000	32	9,3
6.	500.000 keatas	75	21,7
7.	Tidak menjawab	23	6,7
	Total	345	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari masyarakat yang bekerja penghasilan rata-rata setiap bulannya hanya di atas Rp. 500.000 dengan jumlah 75 orang (21,7%).

7. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

Karakteristik responden menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	3	0,8
2.	Tidak tamat SD	68	17,3
3.	Tamat SD/Sederajat	109	27,8
4.	Tamat SMP/Sederajat	77	19,6
5.	Tamat SMA/Sederajat	102	26,0
6.	Tamat Diploma I/II/III	18	4,6
7.	Tamat Sarjana S1	15	3,8
8.	Tidak menjawab	8	2
	Total	400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.7 maka diketahui bahwa ada responden yang tidak memenuhi porsi pendidikan dasar sembilan tahun yaitu tidak tamat SD/ sederajat yaitu 68

orang (17,3%). Namun pendidikan sebagian besar masyarakat adalah tamat SD/ sederajat yaitu 109 orang (27,8), sedangkan untuk jenjang pendidikan S1 hanya 15 orang (3,8%).

8. Karakteristik Responden Menurut Organisasi

Kecenderungan fenomena politik lokal dan nasional di Indonesia saat ini, agama tampaknya terus dianggap penting dalam kontestasi politik. Pertama, bagi kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan dasar teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Dalam kadar tertentu, pada sejumlah kelompok pemilih, kemungkinan program-program, kebijakan, kinerja dan prestasi partai politik agama bagi kehidupan publik tidak menjadi hal yang terlalu penting. Namun yang terpenting adalah asas dasar perjuangan partai politik tersebut tidak semata-mata untuk tujuan politik profan (dunia), namun lebih pada aspek transendental dan sakral (akhirat).

Fenomena menguatnya kalangan elit agama untuk maju dalam bursa Pilkada juga sangat besar. Masing-masing kandidat yang diusung partai nampak memiliki *track record* dalam kepemimpinan organisasi agama tertentu, misalnya dari kalangan NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. Fenomena politik semacam ini terutama muncul dari pola berfikir para elit agama dimana masing-masing pendukung organisasi keagamaan dengan sendirinya akan berfikir secara linear dan serta merta memberikan dukungan dalam pemilihan (Nyarwi, 2008). Karakteristik responden menurut organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Karakteristik Responden Menurut Organisasi

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	NU	212	55,6
2.	Muhammadiyah	25	6,6
3.	Bukan NU dan Muhammadiyah	141	37,0
4.	Tidak menjawab	14	3,5
	Total	400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari sekitar afiliasi responden kepada organisasi agama paling besar ada pada NU yaitu 212 orang (55,6%) keagamaan, sedangkan 25 orang (6,6%) berafiliasi kepada ormas Muhammadiyah.

B. Peran Serta Masyarakat Dalam Menentukan Calon Pemimpin Pemerintahan Di Daerah

1. Masyarakat Dan Media Massa (Cetak)

a. Interaksi masyarakat dengan media massa (cetak)

Identitas responden menurut interaksi dengan media dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Interaksi masyarakat dengan media massa (cetak)

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak pernah	189	48,7
2.	Sangat jarang	28	7,2
3.	Jarang	111	28,6
4.	Sering	52	13,4
5.	Sangat sering	6	1,5
6.	Tidak menjawab	14	3,5
	Total	400	100,0

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa interaksi masyarakat dengan media massa (cetak) di provinsi Lampung adalah 189 orang (48,9%) tidak pernah membaca media masaa (cetak), sedangkan 6 orang (1,5%) sangat sering membaca media massa (cetak).

b. Ketertarikan dengan berita Pilgub

Untuk mengetahui identitas responden menurut ketertarikan dengan berita PILGUB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Ketertarikan dengan berita PILGUB

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat tidak tertarik	7	2,3
2.	Tidak tertarik	23	7,7
3.	Kurang tertarik	79	26,5
4.	Tertarik	163	54,7
5.	Sangat tertarik	20	6,7
6.	Tidak menjawab	6	2,0
	Total	298	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa ketertarikan masyarakat dengan berita Pilgub adalah 23 orang (7,7%) tidak tertarik, sedangkan 20 orang (6,7%) sangat tertarik.

c. Berita dijadikan bahan referensi dalam memilih kepala daerah

Identitas responden menurut ketertarikan dengan berita PILGUB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11. Berita dijadikan bahan referensi dalam memilih Kepala Daerah

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ya	80	28,6
2.	Tidak	59	21,1
3.	Belum tentu	122	43,6
4.	Tidak menjawab	19	6,8
	Total	280	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas maka diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir 48,7% responden mengaku tidak pernah berinteraksi dengan media massa cetak. Ada sekitar 50,7% responden yang 3 bulan terakhir berinteraksi dengan media

meski intensitasnya berbeda-beda yaitu sangat jarang, jarang, sering, sangat sering. Di antara masyarakat yang berinteraksi dengan media tersebut tidak terlalu banyak yang berminat dengan pemberitaan tentang pemilihan gubernur. Hanya 5% dari total responden yang berinteraksi dengan media yang menyatakan sangat tertarik dan tertarik dengan pemberitaan seputar pemilihan kepala daerah. Di antara responden tersebut kemudian ada 28,6% yang menjadikan berita sebagai referensi dalam memilih kepala daerah.

Data tersebut menunjukkan bahwa media cetak tidak cukup besar pengaruhnya dalam proses pemilihan kepala daerah di Lampung. Hal ini paling tidak dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat penghasilan masyarakat Lampung. Dari data di atas, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan memperlihatkan ciri masyarakat Lampung yang belum menjadikan media massa sebagai konsumsi rutin.

d. Frekuensi dengar radio 3 bulan terakhir

Identitas responden menurut frekuensi dengar radio 3 bulan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.12. Berdasarkan tabel 4.12 maka diketahui bahwa frekuensi mendengar radio dalam tiga bulan terakhir ini adalah 146 orang (37,6%) menyatakan tidak pernah, sedangkan 5 orang (1,3%) menyatakan sangat sering.

Tabel 4.12. Frekuensi dengar radio 3 bulan terakhir

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak pernah	146	37,6
2.	Sangat jarang	25	6,4
3.	Jarang	122	31,4
4.	Sering	90	23,2
5.	Sangat sering	5	1,3
	Total	388	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

e. Acara radio yang sering didengar

Identitas responden menurut acara radio yang sering didengar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13. Acara radio yang sering didengar

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	11	3,9
2.	Musik	120	42,9
3.	Dialog	18	6,4
4.	Berita	131	46,8
	Total	280	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

f. Berita radio menjadi referensi Pilgub

Identitas responden menurut berita radio yang menjadi referensi Pilgub dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14. Berita radio menjadi referensi Pilgub

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Ya	71	24,0
2.	Tidak	62	20,9
3.	Belum tentu	130	43,9
4.	Tidak menjawab	33	11,1
	Total	296	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan interaksi masyarakat dengan radio lebih tinggi daripada dengan media cetak. Hanya 37,6 % masyarakat yang sama sekali tidak pernah mendengarkan radio. Selebihnya mengaku mendengarkan radio dengan intensitas berbeda yaitu sangat jarang (6,4%), jarang (31,4%), sering (23,2%), sangat sering (1,3%). Program siaran radio yang paling diminati, responden memilih berita (46,8%) dan musik (42,9%) sebagai pilihan utama. Namun hanya 24 % responden yang menegaskan berita radio sebagai referensi pilgub.

Informasi-informasi diatas tentang interaksi antara masyarakat pemilih dengan media massa baik cetak maupu elektronik merupakan bagian dari proses membangun persepsi. Individu-individu dalam masyarakat membaca, menyaksikan, dan mendengar peristiwa-peristiwa politik melalui media massa, termasuk fenomena pemilihan kepala daerah. Proses pembangunan persepsi melalui interaksi masyarakat dengan media massa yang dikuatkan oleh pendapat King dan Robinson (1994: 36). Menurut keduanya, persepsi adalah bagaimana kita melihat, mendengarkan, merasakan, mengecap dan mencium dunia sekitar kita. Dengan kata lain persepsi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu hal yang dialami oleh manusia. Artinya persepsi memfokuskan pada sisi yang dialami oleh individu manusia itu sendiri yaitu bagaimana individu-individu manusia dapat melihat, mengecap, mendengarkan, merasakan dan mencium fenomena yang terjadi dan lebih menitikberatkan pada apa yang dialami oleh individu itu sendiri.

2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pilgub

a. Mengetahui Pilgub Langsung

Identitas responden menurut pengetahuan Pilgub langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15. Mengetahui Pilgub Langsung

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Belum tahu	194	49,4
2.	Sudah tahu	197	50,1
3.	Tidak menjawab	2	,5
	Total	393	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.15 maka diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang pilgub: 194 orang (49%) belum tahu sedangkan 197 orang (50,1%) sudah tahu.

b. Asal informasi mengenai Pilgub

Identitas responden menurut asal informasi Pilgub dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Asal informasi mengenai Pilgub

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	9	4,4
2.	Teman	31	15,3
3.	Tokoh masyarakat	39	19,2
4.	Kiyai/Guru Ngaji/Ustad	3	1,5
5.	Kepala desa	12	5,9
6.	Spanduk/pamphlet	9	4,4
7.	Media elektronik (TV/Radio)	34	16,7
8.	Media cetak (koran/majalah/tabloid)	44	21,7
9.	Organisasi yang diikuti	5	2,5
10.	Orangtua	4	2,0
11.	Suami/istri	9	4,4
12.	Tidak menjawab	4	2,0
	Total	203	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.16 maka diketahui bahwa media massa baik cetak (21,7%) maupun elektronik (16,7%) masih menjadi sumber atau asal informasi mengenai pilgub, di samping tokoh masyarakat (19,2%).

c. Tanggal pelaksanaan Pilgub

Identitas responden menurut informasi mengenai tanggal pelaksanaan Pilgub dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17. Tanggal pelaksanaan Pilgub

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Belum tahu	372	94,4
2.	Sudah tahu	20	5,1
3.	Tidak menjawab	2	0,5
	Total	394	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas maka diketahui bahwa 372 orang responden (94%) belum mengetahui tanggal pelaksanaan Pilgub, sedangkan 20 orang (5,1%)

sudah mengetahui. Walaupun ketentuan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah ditetapkan sejak 2004 dan pilkada di beberapa daerah di Lampung sudah berlangsung sejak 2005, ternyata jumlah masyarakat Lampung yang belum mengetahui bahwa gubernur pun akan dipilih langsung oleh masyarakat masih cukup tinggi yaitu sebesar 94,4% sebagaimana tergambar dalam tabel 4.17.

Kondisi masyarakat yang belum tahu tanggal pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung sebesar 94,4% ini diduga terjadi karena kurang optimalnya sosialisasi oleh KPUD. Rencana pergantian KPUD Provinsi Lampung diduga memengaruhi kinerja mereka dalam menginformasikan berbagai agenda pilkada ke masyarakat. Setelah menyusun jadwal pilkada yang sebelumnya akan berlangsung 10 Oktober 2008 kemudian diubah menjadi 3 September 2008.

Sosialisasi menjadi faktor penting sebagai sebuah langkah awal kesuksesan pemilihan kepala daerah Lampung. Mengingat secara geografis Lampung adalah daerah yang cukup luas, selain itu akses informasi publik yang ada secara rutin belum sepenuhnya didapatkan masyarakat, maka KPUD bersama unsur-unsur lainnya harus mampu melakukan sosialisasi yang rutin dan efektif sehingga pemilih dapat mengetahui hal-hal mendasar yang menjadi aturan pelaksanaan Pilgub.

Informasi-informasi tentang pengetahuan tentang pilgub bagi masyarakat pemilih merupakan bagian dari pengetahuan pemilih. Pengetahuan secara detail tentang tahapan pilkada menjadi indikasi persepsi pemilih dan gambaran sikap serta tindakan yang akan dilakukan pada momentum pilkada. Hal ini sejalan dengan pandangan Mar'at (1981: 21) yang menyatakan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Aspek kognisi

merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan penerimaan dan kemauan untuk berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa persepsi adalah kesan sebagai akibat dari adanya suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, akan menentukan penerimaan dan kemauan untuk melakukan sesuatu.

3. Partisipasi Dalam Pilgub

a. Akan memilih dalam Pilgub

Identitas responden menurut partisipasi akan memilih dalam pilgub dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18. Akan memilih dalam Pilgub

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak	4	1,0
2.	Ya	370	93,2
3.	Belum tentu	23	5,8
	Total	397	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa partisipasi responden dalam Pilgub yaitu 4 orang (1%) tidak akan berpartisipasi sedangkan 370 orang (93,2%) akan ikut berpartisipasi.

b. Alasan mengikuti Pilgub

Identitas responden menurut alasan ikut pilgub dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19. Alasan mengikuti Pilgub

No	Pilihan jawaban	Frek	Presentasi
1.	Supaya menghasilkan pemimpin yang bebas KKN	47	12,1
2.	Supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik	119	30,6
3.	Supaya pendidikan anak-anak terjamin	14	3,6
4.	Karena yakin prosesnya akan jujur dan demokratis	10	2,6

5.	Supaya ekonomi keluarga membaik	35	9,0
6.	Merupakan hak warga negara	130	33,4
7.	Supaya kehidupan pertanian lebih membaik	22	5,7
8.	Tidak menjawab	12	3,1
	Total	389	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.19 di atas maka diketahui bahwa alasan responden mengikuti Pilgub untuk menghasikan pemimpin yang bebas KKN adalah 47 orang (12,1%), sedangkan alasan supaya pendidikan anak-anak terjamin berjumlah 14 orang (3,6%).

c. Pilgub menghasilkan gubernur yang mampu memimpin

Identitas responden menurut alasan Pilgub menghasilkan gubernur yang mampu memimpin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20. Pilgub menghasilkan gubernur yang mampu memimpin

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak yakin	1	,3
2.	Tidak yakin	86	21,8
3.	Yakin	268	68,0
4.	Sangat yakin	14	3,6
5.	Tidak menjawab	25	6,3
	Total	394	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, maka diketahui bahwa alasan memilih dalam pilgub menghasilkan gubernur yang mampu memimpin yaitu 268 orang (68,0%) menjawab yakin, sedangkan 86 orang (21,8%) menjawab tidak yakin.

d. Pilgub menghasilkan gubernur yang berpihak pada rakyat

Identitas responden menurut alasan pilgub menghasilkan gubernur yang berpihak pada rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21. Pilgub menghasilkan gubernur yang berpihak pada rakyat

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Tidak yakin	93	23,6
2.	Yakin	261	66,2
3.	Sangat yakin	10	2,5
4.	Tidak menjawab	30	7,6
	Total	394	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, maka diketahui bahwa responden yang meyakini bahwa Pilgub menghasilkan gubernur yang berpihak pada rakyat sebanyak 261 orang (66,2%), sedangkan 93 orang (23,6%) menjawab tidak yakin.

Sebanyak 93,2% responden menyatakan akan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur. Keinginan untuk berpartisipasi ini cukup tinggi, jika dibandingkan dengan besarnya angka golput di berbagai pilkada yang sudah berlangsung. Keinginan berpartisipasi ini juga dapat ditinjau dari aspek keterikatan masyarakat sebagai pemilih dengan kandidat yang akan dipilih. Ida (2003) menyebutkan bahwa ketika pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa yang menjadi pilihan para elit DPRD merupakan harapan masyarakat. Hal lain juga disebutkan oleh Haris (2003) tentang kontribusi pilkada secara langsung yaitu keinginan berpartisipasi dalam pemilihan antara lain, *pertama*, pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai. *Kedua*, untuk meningkatkan akuntabilitas para elit politik lokal. *Ketiga*, menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal, *keempat*, memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional. Data tersebut telah memperlihatkan bahwa makna tingginya keinginan untuk berpartisipasi dalam Pilgub Lampung sebagai sebuah penguatan kedaulatan oleh pemilih.

Partisipasi untuk memilih dalam Pilgub Lampung didorong beragam alasan. Ada 3 alasan yang paling dominan yaitu karena merupakan hak warga negara (33,4%), supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik (30,6%), dan supaya menghasilkan pemimpin yang bebas KKN (12,1%). Tiga alasan yang dominan tersebut memperlihatkan adanya faktor dorongan internal dan eksternal. Dorongan internal dapat terlihat dari alasan memilih karena hak. Sedangkan faktor eksternal adalah keinginan agar terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dan supaya menghasilkan pemimpin yang bebas KKN.

Keyakinan masyarakat bahwa pemilihan gubernur akan menghasilkan gubernur yang mampu memimpin juga tinggi yakni 71,6 % yang masuk dalam kategori yakin dan sangat yakin. Keyakinan pemilihan gubernur akan menghasilkan gubernur yang berpihak pada rakyat juga cukup tinggi yaitu sebesar 66,2 %. Keinginan untuk berpartisipasi juga dapat dilihat dari dua aspek tersebut. Keyakinan Pilgub akan menghasilkan gubernur yang mampu memimpin dan berpihak kepada rakyat menjadi faktor pendukung dari alasan partisipasi.

Tingginya angka rencana partisipasi yang akan diberikan pemilih di Lampung dalam pilkada menggambarkan perubahan dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan partisipasi di era globalisasi, dimana kedaulatan rakyat mendapat kedudukan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Kedaulatan rakyat merupakan legitimasi yang paling rasional atas eksistensi dan hak politiknya. Kemudian diperkuat juga dengan pendapat Kusnadi dan Saragih (1998:238) mengemukakan bahwa rasionalitas merupakan antitesis dari dominasi otoriter yang ada pada abad ke-17, dimana rakyat selalu menjadi korban kekuasaan raja-raja feodal.

4. Pendapat Masyarakat Tentang Proses Pemilihan Gubernur

a. Pilgub akan terlaksana dengan jujur dan adil

Identitas responden berdasarkan keyakinan pilgub akan terlaksana dengan jujur dan adil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22 Pilgub akan terlaksana dengan jujur dan adil

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak yakin	2	,5
2.	Tidak yakin	119	30,5
3.	Yakin	227	58,2
4.	Sangat yakin	11	2,8
5.	Tidak menjawab	31	7,9
	Total	390	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa responden memilih menjawab tidak yakin Pilgub akan terlaksana dengan jujur dan adil sebanyak 119 orang (30,5%), sedangkan 227 orang (58,2%) menjawab yakin.

b. Masyarakat akan memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun

Identitas responden menurut alasan akan memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23 Masyarakat akan memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak yakin	2	,5
2.	Tidak yakin	83	21,0
3.	Yakin	268	67,7
4.	Sangat yakin	14	3,5
5.	Tidak menjawab	29	7,3
	Total	396	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa masyarakat akan memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun adalah 83 orang (21%) tidak yakin, sedangkan 268 orang (67,7%) menjawab yakin.

c. Pilgub akan menyebabkan konflik di masyarakat

Identitas responden menurut alasan pilgub akan menyebabkan konflik di masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.24 Pilgub akan menyebabkan konflik di masyarakat

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak yakin	5	1,3
2.	Tidak yakin	110	27,6
3.	Yakin	242	60,8
4.	Sangat yakin	12	3,0
5.	Tidak menjawab	29	7,3
	Total	398	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang tidak meyakini bahwa pilgub akan menyebabkan konflik di masyarakat sebanyak 110 orang (27,6%), sedangkan 242 orang (60,8%) menjawab yakin.

d. Reaksi masyarakat jika ada yang memberikan uang/barang

Identitas responden berdasarkan reaksi masyarakat jika ada yang memberikan uang/barang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25 Reaksi masyarakat jika ada yang memberikan uang/ barang

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Prsentase
1.	Menolak dan melaporkannya	67	16,9
2.	Menolak dan diam saja	100	25,2
3.	Menerima dan tidak memilih	17	4,3
4.	Menerima dan mengikuti anjurannya	27	6,8
5.	Menerima dan belum tentu memilih	161	40,6
6.	Tidak menjawab	25	6,3
	Total	397	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa reaksi masyarakat jika ada yang memberikan uang/barang yaitu 161 orang (40,6%) menjawab menerima dan belum tentu memilih, sedangkan hanya 17 orang (4,3) menerima dan tidak memilih.

e. Pendapat masyarakat tentang pernyataan: Jika ada yang memberi uang/barang, uang/barangnya diterima, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani

Identitas responden tentang pernyataan: Jika ada yang memberi uang/barang, uang/barangnya diterima, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.26 Pendapat masyarakat tentang pernyataan: Jika ada yang memberi uang/barang, uang/barangnya diterima, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak setuju	17	4,3
2.	Tidak setuju	108	27,3
3.	Setuju	214	54,0
4.	Sangat setuju	41	10,4
5.	Tidak menjawab	16	4,0
	Total	396	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa pernyataan: Jika ada yang memberi uang/barang, uang/barangnya diterima, tetapi memilih sesuai dengan hati nurani terdapat 108 orang (27,3%) yang menyatakan tidak setuju, sedangkan 214 orang (54%) setuju.

Sepanjang pelaksanaan pilkada yang terjadi di tanah air, setidaknya ada empat masalah yang senantiasa mewarnai pelaksanaan tahapan Pilkada. Diantaranya proses pilkada yang berlangsung tidak jujur dan adil, adanya intimidasi kepada pemilih, konflik antar elit atau masyarakat pendukung kandidat

tertentu, dan politik uang. Keempat hal tersebut, dalam penelitian ini diuji satu persatu.

Pendapat responden yang menyebutkan yakin pilgub terlaksana dengan jujur dan adil (58%), serta tidak yakin 30,5 %. Penyelenggara pilkada menjadi faktor penting atas terselenggaranya pilkada yang jujur. Penyelenggaraan yang jujur juga menjadi faktor penting, terutama kaitannya dengan penetapan hasil pilkada. Dari pilkada yang berlangsung kisruh di beberapa daerah salah satu sebabnya adalah hasil pilkada yang tidak diterima oleh salah satu pihak karena penyelenggara (KPUD) dianggap tidak memegang prinsip jujur.

Kaitannya dengan independensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, dari hasil penelitian didapatkan data bahwa keyakinan masyarakat terhadap independensi pemilih dalam menetapkan pilihan tanpa intervensi pihak manapun cukup tinggi (71,2%). Namun masih ada 21,5% lainnya yang tidak yakin masyarakat dapat memilih tanpa adanya tekanan pihak lain. Hal ini juga faktor yang perlu diwaspadai. Makna kedaulatan akan kembali tereduksi jika pemilih tidak dapat menentukan pilihan politiknya secara otonom.

Dari empat faktor di atas, ada satu faktor yang cukup mengkhawatirkan yaitu potensi munculnya konflik di masyarakat. Dari data yang didapatkan menyebutkan bahwa 60,8 % masyarakat yakin pilgub akan menyebabkan konflik di masyarakat, hanya 27,6 % yang menyatakan tidak akan timbul konflik. Meskipun dari sembilan pilkada kabupaten dan kota yang telah berlangsung di Lampung relatif tidak ada konflik yang berarti. Meskipun demikian mengingat pilgub ini memiliki skala yang luas tentu saja hal tersebut tetap harus diwaspadai. Beberapa daerah yang telah menyelenggarakan pilkada hal ini juga pernah terjadi.

Hal yang menarik adalah ketika ada kandidat yang memberikan uang atau barang, 40,6 % masyarakat mengatakan akan menerima tapi belum tentu akan memilih kandidat tersebut. Hanya 6,8% saja yang mengaku akan menerima dan mengikuti anjuran sang kandidat. Selebihnya mengatakan akan menolak dan melaporkannya (16,9%), menolak dan diam saja (25,2%), dan menerima tapi tidak memilihnya (4,3%). Data tersebut mengisyaratkan kemajuan yang cukup baik dari aspek perilaku pemilih. Masyarakat sudah punya kesadaran yang baik bahwa suaranya tidak dapat dibeli dengan imbalan tertentu.

Terhadap pernyataan "Jika ada yang memberi uang/barang, Terima Uang / barangnya, tapi kalau memilih sesuai nurani", 64,4% responden menyatakan setuju dan 31,6 % lainnya tidak sependapat dengan pernyataan itu. Pemilih sudah cukup pintar menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya bukan lagi kepada aspek-aspek materi.

Perilaku ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi kandidat yang akan mengikuti kompetisi pilkada Lampung yang akan datang. Jika kandidat masih mengandalkan politik uang dalam mendapatkan dukungan, selain itu adalah proses pembodohan, menghilangkan kreativitas dan yang tak penting adalah hasilnya belum pasti.

Berdasarkan temuan di lapangan terkait dengan peran serta masyarakat dalam menentukan calon pemimpin pemerintahan di daerah dapat dinyatakan bahwa peran serta masyarakat ditandai oleh aktivitas dengan media massa, menerima informasi-informasi pilkada untuk menambah pengetahuan, dan penentuan pilihan pada hari pelaksanaan pemilihan. Peran serta masyarakat dalam dalam pilkada ini cukup tinggi yaitu sebesar 93,2%. Angka partisipasi yang tinggi

ini semakin menguatkan pandangan Sadu Wasitiono (2003: 5) bahwa salah satu di antara hak dasar daerah otonomi yakni hak memilih pemimpinnya sendiri secara bebas.

Tingginya angka partisipasi tersebut juga sekaligus mulai meminimalisasi kekhawatiran praktek otonomi daerah yang mengabaikan desentralisasi politik dan demokrasi lokal. Kekhawatiran Legowo (2003:2-3) bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama ini, dengan program desentralisasi yang progresif, tidak diikuti secara serta merta dengan program desentralisasi demokratis yang membuka keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah, secara perlahan akan tereduksi dengan semakin baiknya praktek partisipasi masyarakat.

Angkat partisipasi yang tinggi dari hasil penelitian ini juga menjawab hasil GTZ Advisory Team, sebagaimana yang di kutip Chandra (2004: 45). GTZ Advisory Team menjelaskan bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keseluruhan akses kepada pembuatan keputusan, alokasi sumber-sumber, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas proses pembangunan belum sepenuhnya mendapat perhatian utama dalam program desentralisasi. Melalui temuan lapangan ini, partisipasi masyarakat dalam program desentralisasi, khususnya desentralisasi politik, semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas ke arah yang lebih baik.

C. Faktor-Faktor Yang Akan Menjadi Pertimbangan Bagi Masyarakat Dalam Menentukan Kepala Daerah Yang Akan Dipilih

a. Sosok ideal Cagub dan Cawagub

Identitas responden tentang sosok ideal Cagub dan Cawagub dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27 Penilaian pemilih tentang sosok ideal Cagub dan Cawagub

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	9	2,3
2.	Yang punya akhlak/integritas moral yang baik	194	49,5
3.	Yang berwibawa	25	6,4
4.	Yang merakyat	138	35,2
5.	Sederhana/bersahaja	21	5,4
6.	Tampan/ganteng	5	1,3
	Total	392	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel 4.27 diketahui bahwa 194 orang (49,5%) responden memilih sosok ideal Cagub dan Cawagub yang memiliki akhlak/integritas moral yang baik, sedangkan 5 orang (1,3%) menjawab tampan/ganteng.

b. Seberapa penting integritas/akhlak Cagub dan Cawagub

Identitas responden tentang seberapa penting integritas/akhlak Cagub dan Cawagub dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.28 Penilaian pemilih tentang penting integritas/akhlak Cagub dan Cawagub

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak penting	6	1,5
2.	Tidak penting	4	1,0
3.	Penting	163	41,5
4.	Sangat penting	210	53,4
5.	Tidak menjawab	10	2,5
	Total	393	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang berpendapat integritas/akhlak Cagub dan Cawagub sangat penting adalah 210 orang (53,4%), sedangkan 4 orang (1,0%) menjawab tidak penting.

Mengenai sosok cagub dan cawagub ideal, mayoritas responden memilih figur yang mempunyai integritas moral (49,5%) serta sikap merakyat (35,2%). Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat responden yang menganggap faktor integritas atau akhlak sebagai hal penting (41,5%) dan sangat penting (53,4%). Sebagaimana diungkapkan Rumadi (2007), integritas kandidat menjadi faktor pertimbangan pemilih. Dalam prakteknya, masyarakat mungkin saja mengombinasikan faktor integritas dengan faktor-faktor lainnya.

c. Faktor yang jadi pertimbangan masyarakat dalam memilih Cagub dan Cawagub

Identitas responden tentang pertimbangan masyarakat dalam memilih cakada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.29 Penilaian pemilih tentang faktor yang jadi pertimbangan masyarakat dalam memilih cakada

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	16	6,0
2.	Tergantung suku kandidat	10	3,7
3.	Tergantung organisasi keagamaan kandidat	14	5,2
4.	Tergantung program kandidat	55	20,6
5.	Tergantung apakah calon tersebut berpengalaman jadi KADA	69	25,8
6.	Integritas/moral kandidat	82	30,7
7.	Tergantung kemanfaatan materi yang diberikan kandidat	8	3,0
8.	Tidak menjawab	13	4,9
	Total	267	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa pertimbangan masyarakat dalam memilih cakada adalah 82 (30,7%) menjawab integritas/moral, sedangkan 8 (3,0%) tergantung kemanfaatan materi yang diberikan kandidat.

d. Apakah masyarakat akan memilih calon yang sudah berpengalaman sebagai Kepala Daerah

Identitas responden tentang apakah masyarakat akan memilih calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 4.30 Penilaian pemilih tentang calon yang sudah berpengalaman sebagai Kepala Daerah (*incumbent*)

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Tidak	99	25,2
2.	Ya	212	53,9
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	82	20,9
	Total	393	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa apakah msyarakat akan memilih calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah adalah 212 (53,9%) menjawab ya, sedangkan 99 (25,2%) menjawab tidak.

e. Apakah masyarakat langsung memilih cakada yang diusung oleh partai yang dipilih pada pemilu 2004

Identitas responden tentang apakah masyarakat langsung memilih cakada yang diusung oleh partai yang dipilih pada pemilu 2004 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31 Penilaian pemilih tentang cakada yang diusung oleh partai yang dipilih pada pemilu 2004

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Belum tentu	245	66,2
2.	Ya	102	27,6
3.	Tidak menjawab	23	6,2
	Total	370	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa masyarakat langsung memilih cakada yang diusung oleh partai yang dipilih pada pemilu 2004 adalah 245 (66,2%) menjawab belum tentu, sedangkan 102 (27,6%) menjawab ya.

f. Apakah masyarakat akan memilih cakada yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama

Identitas responden tentang apakah masyarakat akan memilih cakada yang berasal dari organisasi keagamaan disajikan pada tabel 4.32 berikut:

Tabel 4.32 Penilaian pemilih tentang cakada yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Tidak	177	45,2
2.	Ya	150	38,3
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	65	16,6
	Total	392	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa masyarakat akan memilih cakada yang berasal dari organisasi keagamaan adalah 177 (45,2%) menjawab tidak, sedangkan 150 (38,3%) menjawab ya.

Dari hasil penelitian nampak ada 3 alasan dominan yang dijadikan pertimbangan dalam memilih kandidat sebagaimana tersaji dalam tabel 3 c yaitu integritas moral kandidat (30,7%), pengalaman (25,8%), dan program (20,6%). Hal ini menunjukkan adanya kombinasi pertimbangan masyarakat dalam memilih. Hasil penelitian ini menguatkan pendapat Rumadi (2007) yang menyebutkan ada lima hal yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya yaitu kesamaan ideologis, afiliasi partai politik, kesamaan etnisitas, pragmatisme, dan program serta integritas kandidat.

Pengaruh partai politik terhadap pilihan warga juga terlihat dalam tabel 3 e. Ada 27,6 % warga yang menyatakan akan langsung memilih kandidat usungan partai politik yang dipilihnya pada pemilu 2004. Namun, 66,2 % warga mengatakan belum tentu memilih kandidat yang diusung partai politik yang mereka pilih di pemilu 2004. Data ini menunjukkan cairnya ikatan antara partai politik dengan konstituen pemilih. Pemilih partai politik tidak langsung memilih kandidat yang diusung parpol pilihannya.

Terkait faktor pengalaman, 53,9 % warga menyatakan akan memilih kandidat yang sudah punya pengalaman, sedangkan 25,2% lainnya mengatakan tidak. Pilihan warga terhadap calon yang berpengalaman sebanding dengan tingginya warga yang memilih faktor pengalaman sebagai pertimbangan dalam pilgub (25,8%) sebagaimana tertera dalam tabel 3 c.

Faktor ideologis dalam memilih dapat dilihat pada tabel 3 f. Ada 38,5 % pemilih yang akan memilih kandidat kepala daerah yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama. Mereka tergolong pemilih yang punya ikatan kuat secara ideologis maupun emosional dengan organisasi-organisasi keagamaan tempat mereka berafiliasi. Namun ada 45,2 % pemilih yang tidak akan memilih kandidat yang berasal dari organisasi keagamaan yang sama.

Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Nursal dalam Komariah (2005) yang menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pemilih sebagai berikut: *Social Imagery* atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial), Identifikasi Partai, *Emotional Feelings* (Perasaan Emosional), *Candidate Personality* (Citra Kandidat), *Issues and Policies* (Isu dan

Kebijakan Politik). *Current Events* (Peristiwa Mutakhir), *Personal Events* (Peristiwa Personal), dan *Epistemic Issues* (Faktor-faktor Epistemik).

d. Yang paling mempengaruhi dalam menentukan pilihan cakada

Identitas responden tentang apakah yang paling mempengaruhi dalam menentukan pilihan cakada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.33 Penilaian pemilih tentang faktor paling mempengaruhi dalam menentukan pilihan Cakada

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Ustad/ulama/kiai	35	8,9
2.	Tokoh adat/suku	14	3,6
3.	Partai politik yang dipilih pada pemilu	28	7,1
4.	Pilihan sendiri/hasil pengamatan	232	58,9
5.	Suami/istri	38	9,6
6.	Orangtua	8	2,0
7.	Media cetak/elektronik	7	1,8
8.	Mahasiswa	1	,3
9.	Kepala desa	10	2,5
10.	Ketua RT/RW	6	1,5
11.	Organisasi yang saya ikuti	6	1,5
12.	Tidak menjawab	9	2,3
	Total	394	100,0
Total		400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa independensi warga dalam memilih juga tinggi, 58,9% menyatakan akan memilih berdasarkan pilihan sendiri melalui pengamatan. Dengan jumlah yang cukup bersih ini, pemilih yang relatif otonom harus mampu didekati oleh kandidat secara intensif. Kandidat tidak hanya mengandalkan pendekatan melalui media perantara. Selebihnya pilihan warga juga dipengaruhi oleh suami/isteri (9,6%), ulama (8,9%), dan partai politik yang dipilih pada pemilu (7,1%).

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan Kepala Daerah yang akan

dipilih dapat dikemukakan beberapa temuan. Pertama, masyarakat akan memprioritaskan memilih cakada mempunyai program yang baik, yang demokratis, dan mempunyai integritas. Kedua, masyarakat Lampung menginginkan sosok cakada yang memiliki integritas yang baik serta merakyat.

D. Persepsi Masyarakat Tentang Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur yang Akan Dipilih

1. Pernyataan: Lampung harus dipimpin Gub & Wagub dari suku Lampung

Identitas responden tentang pernyataan: Lampung harus dipimpin Gub & Wagub dari suku Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.34 Persepsi pemilih tentang Lampung harus dipimpin Gubernur & Wakil Gubernur dari suku Lampung

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak setuju	16	4,0
2.	Tidak setuju	172	43,2
3.	Setuju	182	45,7
4.	Sangat setuju	12	3,0
5.	Tidak menjawab	16	4,0
	Total	398	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang setuju dengan pernyataan: Lampung harus dipimpin Gubernur & Wagub dari suku Lampung adalah 182 (45,7%), sedangkan 172 (43,2%) menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil ini dapat dijelaskan bahwa faktor etnis adalah salah satu variabel penting yang dapat menjelaskan pilihan seseorang pada kandidat atau partai tertentu. Argumentasi ini sesuai dengan pendapat Sigelman *et al.* (1995) dalam Eriyanto (2008) bahwa kesamaan ras dan etnik antara pemilih dan partai atau calon pejabat publik cenderung memengaruhi perilaku memilih seseorang.

Meskipun di Indonesia, masih terjadi perdebatan apakah latar belakang etnis kandidat mempengaruhi pilihan seseorang. Yang menarik, ada dua studi yang dilakukan dengan skala nasional, dan menghasilkan temuan yang berbeda perihal sejauh mana etnis berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Studi pertama dilakukan oleh Ananta *et al.* (2004) yang menunjukkan etnis adalah salah satu penjas dalam perilaku pemilih di Indonesia. Ada partai yang diidentikkan sebagai Jawa dan partai luar Jawa.

Besar kecilnya kontribusi variabel etnis dalam menjelaskan pilihan pemilih tergantung pada partai masing-masing. Temuan Ananta *et al.* (2004) menunjukkan hubungan positif yang kuat pada etnis Jawa terdapat pada PKB dan PDIP. Ini mengukuhkan pandangan bahwa kedua partai ini memang partai Jawa. Wilayah banyak suku Jawa punya kecenderungan untuk memilih kedua partai. Sebaliknya, PPP dan Golkar punya hubungan negatif dengan suku non Jawa. Ini juga mengukuhkan kedua partai ini sebagai partai yang selama ini dikenal sebagai partai non Jawa. Ananta menyimpulkan, di Indonesia relatif terdapat kesetiaan etnis yang relatif tinggi, dan partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh etnisitas.

2. Pernyataan : Lampung harus dipimpin pasangan cakada dari Lampung dan luar Lampung

Tabel 4.35 Persepsi pemilih tentang Lampung harus dipimpin pasangan cakada dari Lampung dan luar Lampung

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak setuju	9	2,3
2.	Tidak setuju	109	27,4
3.	Setuju	257	64,6
4.	Sangat setuju	13	3,3
5.	Tidak menjawab	10	2,5
	Total	398	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang tidak setuju Lampung harus dipimpin pasangan cakada dari Lampung dan luar Lampung adalah 109 (27,4%), sedangkan 257 (64,6%) menjawab setuju.

3. Pernyataan : Pasangan cakada harus dari suku terbesar pertama dan kedua di Lampung

Identitas responden tentang pernyataan: Pasangan cakada harus dari suku terbesar pertama dan kedua di Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.36 Persepsi pemilih tentang Pasangan cakada harus dari suku terbesar pertama dan kedua di Lampung

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak setuju	8	2,0
2.	Tidak setuju	153	38,5
3.	Setuju	211	53,1
4.	Sangat setuju	11	2,8
5.	Tidak menjawab	14	3,5
	Total	397	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

4. Pernyataan : Pasangan Gub & Wagub tidak perlu pertimbangan suku

Identitas responden tentang pernyataan: Pasangan gubernur dan wakil gubernur tidak perlu pertimbangan suku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.37 Persepsi pemilih tentang Pasangan Gub & Wagub tidak perlu pertimbangan suku

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat tidak setuju	11	2,8
2.	Tidak setuju	70	17,6
3.	Setuju	277	69,8
4.	Sangat setuju	30	7,6
5.	Tidak menjawab	9	2,3
	Total	397	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang menyatakan tidak setuju pada pernyataan: pasangan gubernur dan wakil gubernur tidak perlu pertimbangan suku adalah 70 (17,6%), sedangkan 277 (69,8%) menjawab setuju.

Dari empat pernyataan tentang faktor kombinasi suku calon kepala daerah terlihat responden tidak begitu konsisten dalam menjadikan suku sebagai variabel utama menentukan calon kepala daerah. Dari tabel 4 a 45,7 % masyarakat setuju Lampung harus dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dari suku Lampung, sedangkan yang tidak setuju 43,2 %. Paparan lain adalah masyarakat Lampung setuju Lampung dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dipimpin pasangan dari suku Lampung dan luar Lampung sebesar 64,6 % dan tidak setuju 27,4 %. Yang ketiga adalah, masyarakat Lampung setuju Lampung dipimpin oleh suku terbesar pertama dan kedua di Lampung 53,1 %, tidak setuju 38,5 %.

Berdasarkan tabel 4.37 nampak bahwa hanya 3,7 % warga yang menjadikan suku sebagai pertimbangan dalam memilih cagub cawagub. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa pasangan Gubernur dan wakil Gubernur tidak perlu mempertimbangkan suku (Setuju 69,8 % dan sangat setuju 7,6 %). Dari data tersebut ketika masyarakat diberikan pilihan suku cukup tersebar pendapat yang menyatakan setuju, tetapi ketika ditanyakan tentang tidak perlu mempertimbangkan suku justru pendapat itu yang lebih dominan.

5. Pendapat tentang cakada dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah

Hal yang sama juga dapat dijumpai dalam arena Pilkada, fenomena menguatnya kalangan elit agama untuk maju dalam bursa Pilkada juga sangat besar. Masing-masing kandidat yang diusung partai nampak memiliki *track record* dalam kepemimpinan organisasi agama tertentu, misalnya dari kalangan

NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. Di sini juga berkembang sejumlah fenomena politik dimana keberadaan ormas keagamaan— seperti NU dan Muhammadiyah—dianggap terus menerus ada dalam tarikan atau dapat menjadi perangkat politik (*political tools*) kepentingan partai politik (PPP, PAN, PKB, PKS dan PBR) dan kandidat yang dicalonkan oleh masing-masing partai politik atau koalisi partai politik (Nyarwi, 2008). Identitas responden tentang cakada dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.38 Persepsi pemilih tentang cakada dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Akan memilih calon dari Muhammadiyah	9	2,3
2.	Akan memilih calon dari NU	123	31,6
3.	Lihat dulu siapa calonnya	135	34,7
4.	Lihat dulu apa programnya	72	18,5
5.	Tergantung partai yang mencalonkan	25	6,4
6.	Tidak tahu/tidak menjawab	25	6,4
	Total	389	100,0
	Total	400	

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa 9 (2,3%) responden akan memilih cakada dengan latar belakang dari Muhammadiyah, sedangkan 123 (31,6%) akan memilih dari NU. Kecenderungan ini didukung oleh data bahwa mayoritas pemilih dalam penelitian ini memang berasal dari latar belakang organisasi NU. Hasil ini menunjukkan bahwa latar belakang organisasi yang diikuti oleh calon juga menjadi pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan pilihan calon kepala daerah.

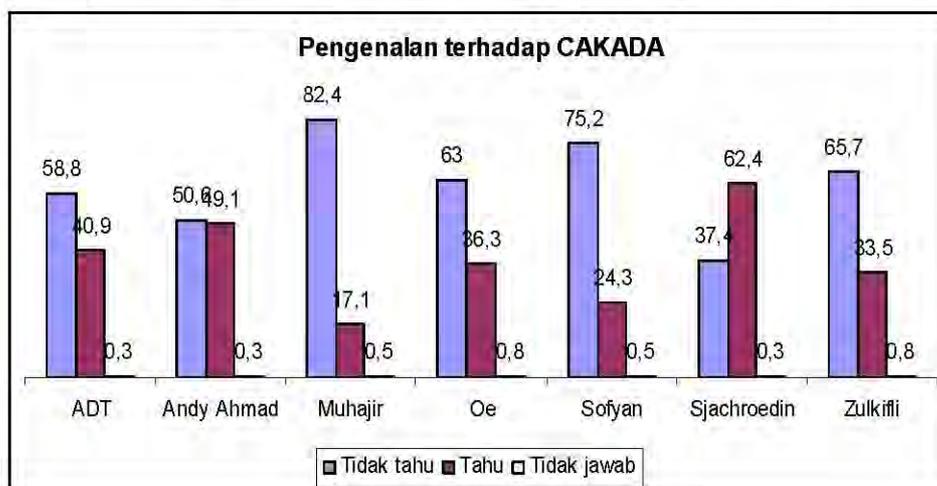
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur yang Akan Dipilih dapat dikemukakan

bahwa etnisitas, integritas dan program kandidat, pragmatisme, agama dan afiliasi pada organisasi dan partai politik cukup berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat Lampung. Hasil ini memperkuat pendapat Rumadi (2007) yang mengategorikan perilaku pemilih ke dalam lima kelompok, yaitu: *Pertama*, penentuan pilihan karena kesamaan ideologi dengan kandidat. *Kedua*, pilihan berdasarkan pada afiliasi partai politik. Kandidat yang didukung partai politik pilihannya, kepada dialah pilihan dijatuhkan. *Ketiga*, pilihan karena kesamaan etnisitas. *Keempat*, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. *Kelima*, pilihan karena program dan integritas kandidat. Perilaku pemilih ini lahir dari persepsi yang dimiliki oleh para pemilih calon kepala daerah yang condong pada hal etnisitas, integritas dan program kandidat, pragmatisme, agama dan afiliasi pada organisasi dan partai politik.

D. Pengetahuan Terhadap Cakada

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka dalam menguji popularitas dan elektabilitas kandidat kepala daerah di Lampung maka penelitian membatasi kepada tujuh orang kandidat. Tujuh orang kandidat ini adalah tokoh-tokoh yang sudah secara terbuka menyatakan pencalonannya, maupun yang sudah menjadi pembicaraan publik melalui media massa yaitu: Alzier Dianis Thabranie (Ketua DPD Golkar Lampung), Andy Achmad Sampurna Jaya (Bupati Lampung Tengah), Muhajir Utomo (Mantan Rektor Universitas Lampung), Oemarsono (Mantan Gubernur Lampung), Sjachroedin (Gubernur Lampung saat ini), dan Zulkifli Anwar (Bupati Lampung Selatan)..

Gambar 4.1 Pengenalan terhadap calon kepada daerah



Tingkat pengenalan masyarakat terhadap cakada secara berurutan sebagai berikut: Sjachroedin (62,4 %), Andy Ahmad (49,1 %), Alzier Dianis Thabranie (40,9 %), Oemarsono (36,3 %), Zulkifli Anwar (33,5 %), Sofyan Jacoeb (24,3 %), dan Muhajir Utomo (7,1 %).

Dari urutan tingkat pengenalan tersebut faktor latar belakang kandidat cukup berpengaruh. Misalnya Sjachroedin yang menjabat sebagai Gubernur berbeda jauh dengan Muhajir Utomo yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung. Tingkat pengenalan ini tentu saja seiring dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh kandidat. Semakin massif dan efektif proses sosialisasi yang dilakukan oleh kandidat maka tingkat pengenalan oleh pemilih juga akan meningkat.

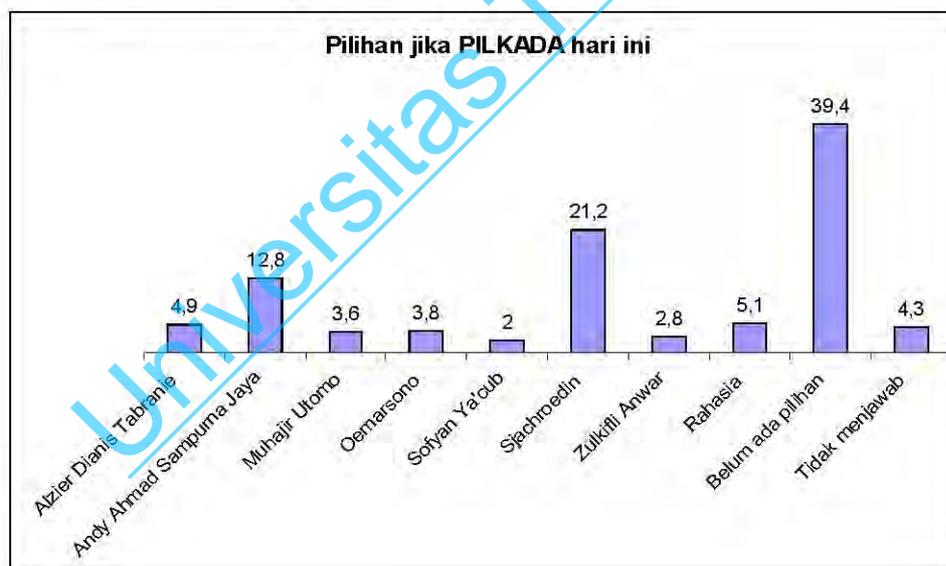
Dari tingkat pengenalan tersebut, mantan Gubernur Lampung Oemarsono masih sangat rendah tingkat pengenalannya oleh masyarakat Lampung. Hal ini dapat disebabkan karena Oemarsono ketika terpilih menjadi Gubernur Lampung melalui pemilihan perwakilan (DPRD) dan ketika menjabat tidak cukup piawai mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat.

g. Pilihan masyarakat jika Pilgub dilakukan hari ini (saat penelitian dilakukan).

Tabel 4.39 Pilihan masyarakat jika Pilgub dilakukan hari ini (saat penelitian dilakukan).

No	Pilihan jawaban	Frequency	%
3	1. Alzier Dianis Tabranie	19	4,9
2	2. Andy Ahmad Sampurna Jaya	50	12,8
5	3. Muhajir Utomo	14	3,6
4	4. Oemarsono	15	3,8
7	5. Sofyan Ya'cub	8	2,0
1	6. Sjachroedin	83	21,2
6	7. Zulkifli Anwar	11	2,8
	8. Rahasia	20	5,1
	9. Belum ada pilihan	154	39,4
	10. Tidak menjawab	17	4,3
	Total	391	100,0
		400	

Gambar 4.2 Pilihan jika Pilkada hari ini



Seandainya pemilihan gubernur Lampung dilakukan hari ini, maka 3 calon yang bakal dipilih warga berturut-turut sebagai berikut: Sjachroedin (21,2 %), Andy Ahmad (12,8 %), Alzier Dianis Thabranie (4,9 %). Tetapi masih ada 39,4 % warga yang belum menentukan pilihan yang dapat saja mengarah ke golput. Tingkat pengenalan (popularitas) dengan tingkat pilihan (elektabilitas) ternyata

berjalan paralel. Sjachroedin, Andy Ahmad dan Alzier yang memperoleh peringkat tiga besar berdasarkan popularitas juga sama ketika dibandingkan dengan elektabilitas.

h. Alasan masyarakat dalam memilih cakada

Tabel 4.40 Alasan masyarakat dalam memilih cakada

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Lainnya	16	6,3
2.	Cocok dengan programnya/punya kemampuan selesaikan persoalan	60	23,4
3.	Integritas moral/akhlak yang baik	41	16,0
4.	Berasal dari suku yang sama dengan calon	5	2,0
5.	Cocok dengan partai yang mencalonkan	15	5,9
6.	Berasal dari satu organisasi keagamaan dengan calon	2	,8
7.	Calon tersebut berpengalaman di pemerintahan	61	23,8
8.	Diberi uang, sembako dll	1	,4
9.	Ada yang menyuruh memilih paket tersebut	7	2,7
10.	Paket tersebut paling populer	11	4,3
11.	Calon tersebut dianggap mampu melakukan perubahan	37	14,5
	Total	256	100,0
	Total	400	

Dari beberapa hal yang menjadi alasan pemilih menentukan pilihannya paling tidak tiga alasan dominan, yaitu kecocokan dengan programnya atau dianggap punya kemampuan menyelesaikan persoalan, karena integritas moral atau akhlak yang baik dan pengalaman di pemerintahan.

i. Alasan masyarakat dalam memilih masing-masing kandidat

Tabel 4.41 Alasan masyarakat dalam memilih masing-masing kandidat

		PILGUB hari ini				
		Alzier D.T	Andy Ahmad.S.J	Muhajir Utomo	Oe Marsono	Sofyan Ya'cub
Alasannya	Lainnya	1	2	2	2	0
		5,3	3,9	14,3	13,3	0
	Cocok dengan programnya/punya kemampuan selesaikan persoalan	3	9	4	1	1
		15,8	17,6	28,6	6,7	12,5
	Integritas moral/akhlak yang baik	1	4	4	3	2
		5,3	7,8	28,6	20	25
	Berasal dari suku yang sama dengan calon	0	0	1	2	0
		0	0	7,1	13,3	0
	Cocok dengan partai yang mencalonkan	1	0	0	0	1
		5,3	0	0	0	12,5
	Berasal dari satu organisasi keagamaan dengan calon	0	1	0	0	0
		0	2,0	0	0	0
	Calon tersebut berpengalaman di pemerintahan	3	20	1	5	3
		15,8	39,2	7,1	33,3	37,5
	Diberi uang, sembako dll	1	0	0	0	0
		5,3	0	0	0	0
Ada yang menyuruh memilih paket tersebut	0	2	1	0	0	
	0	3,9	7,1	0	0	
Paket tersebut paling populer	4	2	0	1	1	
	21,1	3,9	0	6,7	12,5	
Calon tersebut dianggap mampu melakukan perubahan	5	11	1	1	0	
	26,3	21,6	7,1	6,7	0	
Total		19	51	14	15	8
		100	100	100	100	100

Tabel Lanjutan:

		PILGUB hari ini					Total
		Sjach Roedin	Zulkifli Anwar	Rahasia	Belum ada pilihan	Tidak menjawab	
Alasannya	Lainnya	3	1	2	3	1	17
		3,6	9,1	20	7,1	50	6,7
	Cocok dengan programnya/punya kemampuan selesaikan persoalan	22	6	5	9	0	60
		26,5	54,5	50	21,4	0	23,5
	Integritas moral/akhlak yang baik	12	1	2	11	1	41
		14,5	9,1	20	26,2	50	16,1
	Berasal dari suku yang sama dengan calon	1	0	0	0	0	4
		1,2	0	0	0	0	1,6
	Cocok dengan partai yang mencalonkan	8	0	0	5	0	15
		9,6	0	0	11,9	0	5,9
	Berasal dari satu organisasi keagamaan dengan calon	0	0	0	1	0	2
		0	0	0	2,4	0	0,8
	Calon tersebut berpengalaman di pemerintahan	22	0	1	6	0	61
		26,5	0	10	14,3	0	23,9
	Diberi uang, sembako dll	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	0	0	0,4
	Ada yang menyuruh memilih paket tersebut	0	0	0	3	0	6
		0	0	0	7,1	0	2,4
	Paket tersebut paling populer	2	1	0	0	0	11
		2,4	9,1	0	0	0	4,3
Calon tersebut dianggap mampu melakukan perubahan	13	2	0	4	0	37	
	15,7	18,2	0	9,5	0	14,5	
Total		83	11	10	42	2	255
		100	100	100	100	100	100

Sjachroedin sebagai Gubernur yang masih menjabat (*incumbent*/petahana) memiliki persentase tertinggi faktor dipilihnya karena alasan pengalaman dibandingkan dengan kandidat lainnya. Keberadaan Sjachroedin sebagai *incumbent* menjadi faktor penting tingginya elektabilitas dalam penelitian ini. Dengan jabatannya Sjachroedin memungkinkan untuk berkampanye dengan daya dukung lebih memadai dibandingkan kandidat lainnya. Salah satu kekuatan kampanye Sjachroedin adalah prestasi. Ketika kandidat baru mengampanyekan komitmen, Sjachroedin sudah dapat melakukannya dalam bentuk kebijakan.

Berkaitan dengan alasan pemilih dalam menentukan pilihan kepala daerahnya, hasil penelitian ini memberikan hasil yang lebih variatif dan tegas dibandingkan pendapat Rumadi (2007) dan Nursal dalam Komariah (2005). Pendapat keduanya hanya sebatas mengidentifikasi dan mengkategorikan perilaku pemilih dengan alasan-alasan yang melatarbelakangi pilihannya. Hasil penelitian ini secara tegas menyatakan bahwa alasan pemilih menentukan pilihannya ditentukan oleh tiga alasan dominan, yaitu kecocokan dengan programnya, dianggap punya kemampuan menyelesaikan persoalan, karena integritas moral dan pengalaman di pemerintahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penilaian sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Peran serta masyarakat Lampung untuk terlibat dalam menentukan calon kepemimpinan sektor publik, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2008, dapat dikategorikan tinggi dengan angka partisipasi sebesar 93,2%. Partisipasi masyarakat yang tinggi tidak terlepas dari peran penyelenggara (KPUD) yang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat serta adanya harapan masyarakat Lampung agar manajemen dan organisasi sektor publik mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin publik yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pertimbangan masyarakat dalam memprioritaskan dan menentukan kepemimpinan sektor publik, seperti kepala daerah, didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu rencana-rencana program yang sejalan dengan kepentingan publik, bersikap demokratis, memiliki integritas moral dan pro rakyat dalam menjalankan fungsi manajemen dan kebijakan organisasi publik baik dalam konteks pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengaturan publik.
3. Persepsi dan perilaku masyarakat pemilih yang memiliki keragaman aspek mempengaruhi terpilihnya kepemimpinan sektor publik. Persepsi dan perilaku

publik dalam menentukan kepemimpinan sektor publik, khususnya masyarakat pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2008, didasarkan atas beberapa aspek, yaitu etnisitas, integritas dan program kandidat, pragmatisme, agama dan afiliasi pada organisasi dan partai politik cukup berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat Lampung.

B. SARAN

1. Para pemilih hendaknya terus meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politiknya agar pelaksanaan demokrasi politik lokal semakin baik melalui perluasan partisipasi pada setiap tahap pelaksanaan pilkada seperti tahap persiapan pilkada, pelaksanaan pemungutan, dan penghitungan. Partisipasi politik masyarakat juga perlu dibangun dalam desain koalisi partisipasi yang melibatkan banyak aktor, seperti penyelenggara (KPUD), pengawas Pemilu, organisasi masyarakat sipil, tokoh politik, media massa, dan lainnya, sehingga penjagaan proses politik pilkada dan demokrasi lokal pada umumnya dapat semakin optimal.
2. Masyarakat pemilih hendaknya dapat menentukan pilihannya dalam pilkada secara cerdas dan rasional. Para agen pendidikan politik seperti partai politik dan media massa, hendaknya senantiasa meningkatkan perannya dalam sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat agar menyadari pentingnya memberikan partisipasi politik, sehingga kecerdasan dan kesadaran politik masyarakat dalam pilkada semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya.
3. Hubungan persepsi, perilaku pemilih dan partisipasi politik saling terkait, semakin baik persepsi terhadap Pemilu maka perilaku pemilih semakin baik

dalam partisipasi politiknya. Untuk itu aspek integritas pribadi dan program kerja perlu diperhatikan oleh kandidat dalam membangun kesan dan merancang strategi kampanye untuk memenangkan kompetisi pilkada. Strategi yang dibuat juga hendaknya dapat membangun kepercayaan masyarakat yang memiliki hak pilih agar ikut serta, yakin dan mau terlibat dalam pilkada sebagai perwujudan penggunaan hak politik dalam negara demokrasi.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris., Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata,. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*, "Indonesia's Population Series No. 7, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly.(2008). *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*. Makalah. jimly.com/makalah/namafile/22/DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2000), *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Eriyanto, *Preferensi dan Dukungan Pemilih*, Jurnal Lingkaran Survei Indonesia, Edisi 06, Oktober 2007. Jakarta: LSI.
- Komariyah, Atiq (2005). *Perubahan Pilihan Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif 2004 (Studi Kasus Di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang)*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Gama, Betty dan Widarwati, Nunun Tri. (2008). *Hubungan Antara Kampanye Kandidat Kepala Daerah Dan Perilaku Pemilih Partisipasi Politik Wanita (Studi Pada Ibu-Ibu Rumah Tangga Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sukoharjo)*. *SCRIPTURA*, Vol. 2, No. 1.
- Gaffar, Afan, (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press,
- GTZ Advisory Team, 1997. *Support for Decentralization Easures Discussion Paper on Key Issues in Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia*.
- Haris, Syamsudin, 2003. *Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia*. Seminar Nasional Pemilihan Langsung kab/kota sebagai Wujud Demokrasi Lokal. Semarang.

- Ida, Laode, 2003. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah*. Seminar Nasional Pemilihan Langsung kab/kota sebagai Wujud Demokrasi Lokal.Semarang.
- Legowo, TA., 2005. *Menakar Kualitas Hasil Pilkada: Beberapa Pokok Catatan*. Makalah disampaikan pada Seminar “Pilkada: Masalah dan Prospek”, Jakarta.
- Lincoln (eds), 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Maleong, Lexy 3, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masini, Eleonara B, 2002. *Studi Futuristic, Kebutuhan, Perkembangan, dan Metode Mengarahkan Masa Depan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Manan, Bagir,1996. *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum..* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mar'at. 1981. *Prasangka*. Bandung: Fakultas Psikologi UNPAD.
- Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Method*. New York: Allyn and Bacon.
- Nurjaman, Asep. 1998. *Kepolitikan Orde Baru Dalam Prespektif Struktural dan Kultural*. Malang: UMM Press.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*.
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- PSPK. 2004. *Ketika Rakyat Memimpin*, Edisi 6. Jakarta.
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 2008. *Naskah Akademik Revisi UU 32 Bab IV* :www.parlemen.net
- Rakhmat, Jalaludin. 2002. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaludin. 2002. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.

Sari, Afrina. 2006. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Sudaryanti. 2008. *Analisis Tentang Perilaku Pemilih Pada Pilkada Tahun 2005 di Surakarta, Spirit Politik*. Volume 4, Nomor 2.

Sugiyono. 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Syafarudin. 2008. *Perilaku Memilih Masyarakat Kota dan Desa, Draft Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Urofsky, Melum I. 2001. *Demokrasi, Office of International Program*.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Falsafah dan Implementasi UU nomor 22 Tahun 1999. Ceramah bagi Pejabat Pemda kota Sukabumi*. Sukabumi.

Yves Meny and Andrew Knapp. 1998. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition*. Oxford University Press.

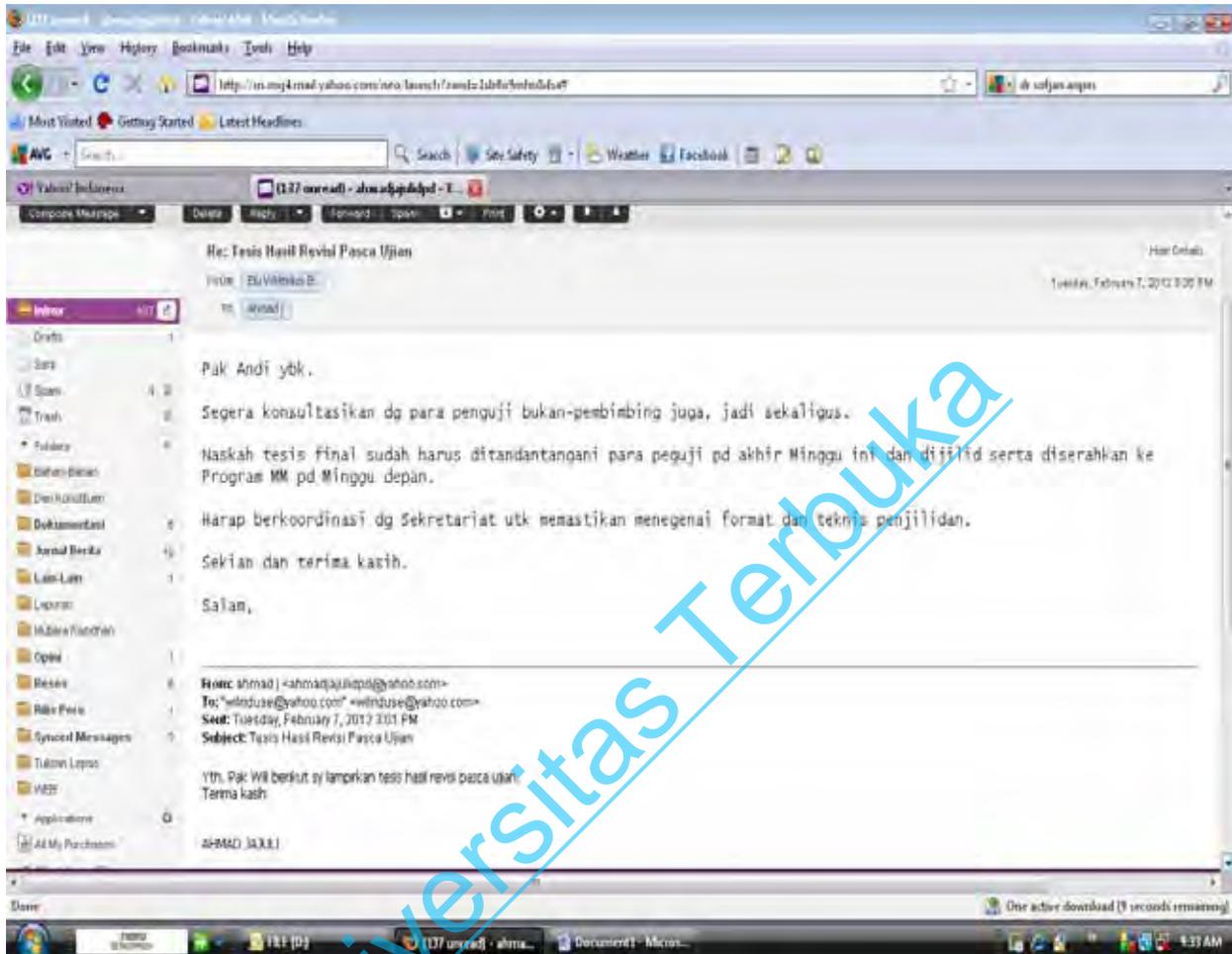
Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeritahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

LAMPIRAN

Universitas Terbuka

Email Dr. Wili pada hari Selasa, 7 Februari 2012



Email Dr. Wili pada hari Rabu, 8 Februari 2012

YAHOO! MAIL

WHAT'S NEW INBOX (231) CONTACTS Re: Tesis Hasil Revisi Pa Re: Tesis Hasil Revisi Pa

Compose Message Delete Reply Forward Spam Print

Re: Tesis Hasil Revisi Pasca Ujian [Hide Details](#)

FROM: Elu Wilfridus B. Wednesday, February 8, 2012 2:30 PM

TO: ahmad j

Baik, Pak, akan segera diperiksa dan diberi tanggapan.

Salam,

From: ahmad j <ahmadjajulidpd@yahoo.com>
To: "wilriduse@yahoo.com" <wilriduse@yahoo.com>
Sent: Tuesday, February 7, 2012 3:01 PM
Subject: Tesis Hasil Revisi Pasca Ujian

Yth. Pak Wili berikut sy lampirkan tesis hasil revisi pasca ujian.
 Terima kash

AHMAD JAJULI

Done One active download (50 seconds remaining)

9:33 AM

Email Dr. Wili pada hari Senin, 13 Februari 2012

